

**SINERGI ANTARA STAKEHOLDER KECAMATAN
DAN PENDAMPING DESA DALAM
MENINGKATKAN INDEKS DESA MEMBANGUN
(Studi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1
Program Studi Manajemen**



**Disusun Oleh :
Muhammad Candri Mawan
NIM : 30402300221**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG
2025**

SKRIPSI

SINERGI ANTARA STAKEHOLDER KECAMATAN DAN PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (Studi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

Disusun Oleh :

Muhammad Candri Mawan

NIM : 30402300221

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 19 Mei 2025

Pembimbing,



Prof. Nurhidayati, SE, M.Si, Ph.D.

NIK. 210499043

**SINERGI ANTARA STAKEHOLDER KECAMATAN DAN
PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN INDEKS DESA
MEMBANGUN**

(Studi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

Disusun oleh:

Muhammad Candri Mawan

30402300221

Pada Tanggal 19 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji

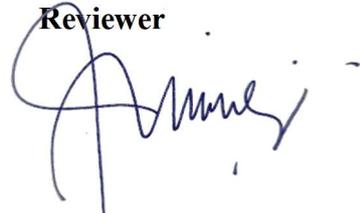
Pembimbing



Digitally signed
by Nurhidayati
Date:
2025.05.20
14:16:08 +07'00'

Prof. Nurhidayati, SE, M.Si, Ph.D.
NIK. 210499043

Reviewer



Dr. Siti Sumiati, SE, M.Si
NIK. 210492029

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Manajemen

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen



Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M
NIK. 210416055

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Candri Mawan
NIM : 30402300221
Program studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
**“SINERGI ANTARA STAKEHOLDER KECAMATAN DAN
PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN INDEKS DESA
MEMBANGUN (Studi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”**
merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara yang
tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di
kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 19 Mei 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Candri Mawan
NIM. 30402300221

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Candri Mawan
NIM	: 30402300221
Program Studi	: S1 Manajemen
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyerahkan hasil karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

“SINERGI ANTARA STAKEHOLDER KECAMATAN DAN PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (Studi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Mei 2025

Yang Memberi Pernyataan


Muhammad Candri Mawan
NIM. 304017003221

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sinergi antara stakeholder di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dalam upaya meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan informan yang terdiri dari camat, sekcab, kasi PMD, ketua paguyuban kepala desa, pendamping desa, dan koordinator tenaga ahli kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara stakeholder telah terbangun melalui komunikasi intensif, pembagian peran yang relatif jelas, serta adanya forum kolaboratif yang mendukung pelaksanaan program. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti ketimpangan pemahaman terhadap indikator IDM, ketidakseimbangan peran, dan kesenjangan komunikasi. Upaya peningkatan dilakukan melalui pelatihan teknis, koordinasi berkala, dan digitalisasi sistem informasi. Dampak sinergi tersebut terlihat pada peningkatan kualitas layanan sosial, penguatan ekonomi lokal melalui UMKM, serta kesiapsiagaan desa dalam mitigasi bencana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan, dan integrasi kebijakan pembangunan desa berbasis indikator IDM.

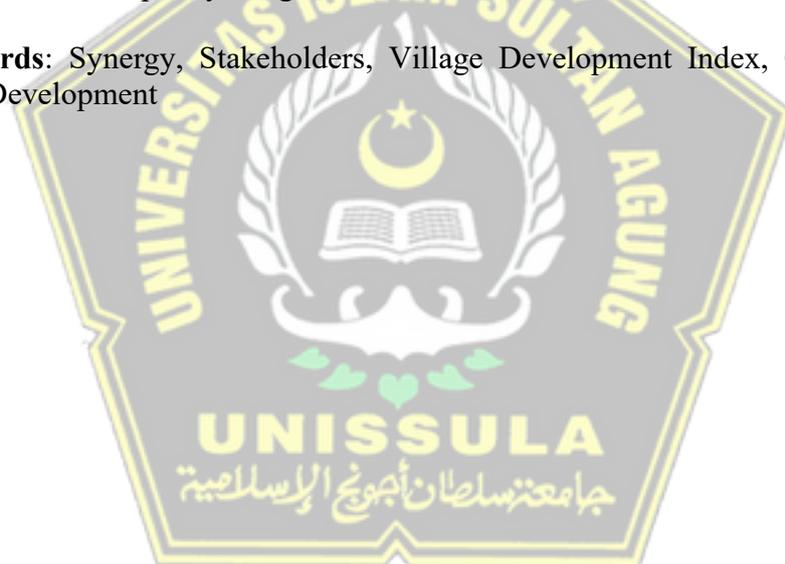
Kata Kunci: Sinergi, Stakeholder, Indeks Desa Membangun, Kolaborasi, Pembangunan Desa



ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the synergy among stakeholders in Sragi Sub-district, Pekalongan Regency, in improving the Village Development Index (IDM). A descriptive qualitative method was employed, involving informants such as the sub-district head, secretary, village government affairs officer (Kasi PMD), head of the village heads' association, village facilitator, and district expert coordinator. The findings indicate that synergy among stakeholders is built through intensive communication, relatively clear role division, and collaborative forums that support program implementation. However, challenges remain, such as gaps in understanding IDM indicators, role imbalance, and communication disparities. Efforts to improve synergy include technical training, regular coordination, and digital information systems. The impacts of this synergy are evident in the improvement of social service quality, strengthening of local economies through MSMEs, and enhanced village preparedness for disaster mitigation. The study recommends strengthening cross-sectoral coordination, continuous human resource development, and policy integration based on IDM indicators.

Keywords: Synergy, Stakeholders, Village Development Index, Collaboration, Rural Development



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul *“SINERGI ANTARA STAKEHOLDER KECAMATAN DAN PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (Studi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”* dengan baik dan lancar guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Nurhidayati SE., M.Si., Ph.D selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dengan baik dan sabar dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Ibu tercinta, Kyai serta keluarga yang senantiasa mensupport juga mendoakan agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
4. Teman-teman, sahabat serta semua pihak yang tulus memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan sehingga terselesainya penyusunan pra skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini yang diajukan ini tidak luput dari kesalahan. Penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan sehingga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengajaran dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Semarang, 19 Mei 2025

Penulis



Muhammad Candri Mawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Collaborative Governance	11
2.1.1 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Kolaboratif11	
2.2 Faktor-Faktor Keberhasilan dan Hambatan Kolaborasi	13
2.3 Konsep Indeks Desa Membangun (IDM).....	13
2.3.1 Pengertian dan Penjabaran Indeks Desa Membangun (IDM) ..14	
2.3.2 Dimensi IDM: Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan.....	15
2.3.3 Kategori Status Desa Berdasarkan IDM.....	15
2.4 Peran Stakeholder dalam Peningkatan IDM	16
2.5 Sinergi Antar-Stakeholder dalam Pembangunan Desa	17
2.5.1 Pentingnya Harmonisasi Peran dalam Pembangunan Desa	17
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21

3.1	Jenis Penelitian	21
3.2	Informan	21
3.3	Lokasi	22
3.4	Sumber Data	23
3.5	Metode Pengumpulan Data	23
3.5.1	Observasi Partisipatif	35
3.5.2	Studi Dokumentasi	35
3.6	Analisis Data	40
BAB IV		41
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		41
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.2	Temuan Penelitian	41
4.2.1	Pengumpulan Data	41
4.2.2	Reduksi Data	101
4.2.3	Penyajian Data	109
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	122
BAB V		127
KESIMPULAN DAN SARAN		127
5.1	Kesimpulan	127
5.2	Saran	128
DAFTAR PUSTAKA		130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Progress Indeks Desa Membangun di Desa Kecamatan Sragi	5
Tabel 3.2.1 Rincian Informan Penelitian.....	22
Tabel 3.5.1 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Camat	24
Tabel 3.5.2 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Sekcam....	26
Tabel 3.5.3 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Kasi PMD	28
Tabel 3.5.4 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Ketua Pauyuban Kepala Desa	29
Tabel 3.5.5 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten	31
Tabel 3.5.6 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Pendamping Desa.....	33
Tabel 4.2.1 Analisis Deskripsi Informan	42
Tabel 4.2.2 Peran spesifik stakeholder dan Efektifitas	43
Tabel 4.2.3 Indikator Indeks Desa Membangun	47
Tabel 4.2.4 Rekapitulasi Instrumen dan Jawaban Informan Camat.....	60
Tabel 4.2.5 Rekapitulasi Instrumen dan Jawaban Informan Sekcam	70
Tabel 4.2.6 Rekapitulasi Instrumen dan Jawaban Informan Kasi PMD.....	74
Tabel 4.2.7 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Ketua Paguyuban Kepala Desa	79
Tabel 4.2.8 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten	87
Tabel 4.2.9 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Pendamping Desa.....	93
Tabel 4.3.1 Rekapitulasi Hasil Jawaban Informan Terkait Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM	102
Tabel 4.3.2 Rekapitulasi Hasil Jawaban Informan Terkait Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder	103
Tabel 4.3.3 Rekapitulasi Hasil Jawaban Informan Terkait Kendala dalam Sinergi dan Solusi yang Diterapkan	106
Tabel 4.3 Rekapitulasi Jawaban dari Informan Terkait Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5-1 Diagram Siergisitas Stakeholder dalam Peningkatan IDM.....	19
Gambar 3.5-1 Data IDM Kecamatan Sragi	36
Gambar 3.5-2 Data Progress IDM Per Desa di Kecamatan Sragi 2024.....	36
Gambar 3.5-3 Data Penyerapan Dana Desa 2024	37
Gambar 3.5-4 Data Realisasi Dana Desa Kementrian Desa PDTT	38
Gambar 3.5-5 Data Penyerapan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa....	39
Gambar 4.3-1 Diagram Siergisitas Stakeholder dalam Peningkatan IDM...	125
Gambar 4.3 Diagram Sinergisitas Stakeholder dalam Peningkatan IDM...	125



LAMPIRAN

Lampiran 1.....	133
Lampiran 2.....	139



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Sebagai entitas terkecil dalam struktur pemerintahan, desa menjadi basis pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat, serta ujung tombak keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Sanur and Artikel 2023) tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan otonom untuk mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan ini, desa diharapkan mampu menjadi subyek pembangunan, bukan sekedar obyek yang tergantung pada intervensi pemerintah pusat (Wahyuni, Qadri, and Elida 2020).

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan desa. IDM mengukur tiga dimensi utama: sosial, ekonomi dan lingkungan, yang secara komprehensif mencerminkan capaian pembangunan desa. IDM tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga panduan untuk menetapkan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Namun, peningkatan nilai IDM tidak dapat dicapai hanya melalui satu pihak. Sinergi antar-stakeholder, seperti camat, sekcab, kasi PMD, pendamping desa dan pemerintah desa, menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan berbasis IDM.

Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, memiliki berbagai potensi desa yang berbeda-beda. Desa-desa seperti Gebangkerep, Kedungjaran, Klunjukan, dan Tegalontar menghadapi tantangan unik, mulai dari masalah sosial hingga kebutuhan ekonomi. Dalam situasi ini sinergi antar-stakeholder sering kali terhambat oleh perbedaan pemahaman, prioritas, dan pola komunikasi. Kurangnya harmonisasi antara perencanaan tingkat kecamatan dan pelaksanaan di desa sering kali menyebabkan in efisiensi dalam penggunaan sumber daya, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat peningkatan IDM. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kolaboratif yang lebih sistematis dan terukur.

Kompleksitas sinergi antar-stakeholder dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Sragi menjadi tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Kecamatan ini terdiri dari desa-desa dengan karakteristik unik, baik dari segi geografis, sosial, maupun ekonomi. Beberapa desa memiliki potensi unggulan seperti sumber daya alam, kewirausahaan, atau program pembangunan yang telah berjalan dengan baik. Namun desa lainnya masih menghadapi masalah seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, atau lemahnya kapasitas pemerintah desa.

Dalam konteks ini, sinergi antar-stakeholder menjadi krusial. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling terkait. Camat, sebagai pemimpin wilayah kecamatan, bertugas memfasilitasi koordinasi strategis lintas desa dan mengarahkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan visi

kabupaten. Sekcam dan kasi PMD bertanggung jawab pada aspek administrasi dan pengawasan agar program sesuai dengan aturan dan tujuan pembangunan. Di sisi lain, pendamping desa berperan langsung dalam mendampingi masyarakat, memperkuat kapasitas pemerintah desa, dan menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa.

Namun, perbedaan fokus dan prioritas seringkali menjadi penyebab konflik atau ketidakefisienan. Sebagai contoh, kepala desa mungkin memiliki program prioritas yang berbeda dengan arahan kecamatan, sehingga sinergi terganggu. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang IDM oleh beberapa stakeholder menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi secara optimal terhadap penilaian IDM (Agustinus, Hedyanti, and Tertinggal 2019).

Keterbatasan dalam mekanisme koordinasi juga menambah kompleksitas sinergi ini. Forum komunikasi rutin, yang seharusnya menjadi wadah harmonisasi tujuan, tidak selalu berjalan efektif karena berbagai kendala, seperti kesibukan jadwal atau kurangnya data berbasis IDM yang tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan. Tanpa data yang valid dan relevan, pengambilan kebijakan menjadi kurang tepat sasaran, sehingga capaian pembangunan desa pun tidak maksimal.

Pada sisi lain, keberhasilan di beberapa desa menunjukkan bahwa sinergi yang kuat dapat menjadi kunci untuk meningkatkan IDM. Desa yang memanfaatkan forum komunikasi secara intensif dan melibatkan semua pihak dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan, cenderung memiliki capaian IDM yang lebih baik. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis data untuk menciptakan sinergi yang efektif dan efisien.

Selain itu, penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dapat mendorong keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi meningkatkan relevansi dan keberlanjutan program yang diimplementasikan (Kessa, 2015). Namun, partisipasi ini hanya dapat dioptimalkan jika ada sinergi antara stakeholder dan pendampig desa yang mampu menjembatani perbedaan perspektif dan membangun komunikasi yang efektif.

Penelitian ini penting untuk memahami dan mengurai kompleksitas sinergi antar-stakeholder dalam konteks lokal Kecamatan Sragi. Dengan mengidentifikasi peran masing-masing pihak, menganalisis tantangan dan peluang kolaborasi, serta mengevaluasi pengaruh sinergi terhadap IDM, diharapkan dapat dirumuskan strategi peningkatan sinergi yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah lain (Shaddiq and Mangkurat 2024).

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Sragi sejak lima tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2024, tercatat bahwa dari 16 desa yang

ada, tidak terjadi peningkatan yang signifikan dalam status perkembangan desa. Selama periode tersebut, seluruh desa di Kecamatan Sragi tetap berada dalam kategori desa berkembang dan belum mencapai status desa maju. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya pembangunan, peningkatan IDM masih stagnan dan memerlukan strategi yang lebih efektif untuk mendorong desa menuju tingkat perkembangan yang lebih tinggi.

Tabel 1.1 Data Progress Indeks Desa Membangun di Desa Kecamatan Sragi

No	Nama Desa	Skor IDM 2020	Skor IDM 2021	Skor IDM 2022	Skor IDM 2023	Skor IDM 2024
1	Ketanon Ageng	'0.6670	'0.6670	'0.6892	'0.6835	'0.6908
2	Mrican	'0.6624	'0.6624	'0.6959	'0.6844	'0.6900
3	Bulaksari	'0.6746	'0.6857	'0.6908	'0.6538	'0.7038
4	Sumub Kidul	'0.6554	'0.6554	'0.6721	'0.7052	'0.7162
5	Kalijambe	'0.6732	'0.6995	'0.7052	'0.6921	'0.7205
6	Sumublor	'0.6771	'0.6771	'0.6917	'0.6860	'0.6937
7	Krasak Ageng	'0.6197	'0.6533	'0.6700	'0.6773	'0.6849
8	Sijeruk	'0.6287	'0.6287	'0.6554	'0.6556	'0.6925
9	Tegalsuruh	'0.6906	'0.7017	'0.6963	'0.6963	'0.6962
10	Bulakpelem	'0.6348	'0.6348	'0.6614	'0.6854	'0.6908
11	Gebangkerep	'0.6567	'0.6681	'0.6910	'0.6908	'0.6944
12	Purworejo	'0.6516	'0.6868	'0.6924	'0.6886	'0.6978

13	Kedungjaran	'0.6487	'0.6508	'0.6467	'0.6295	'0.6865
14	Klunjukan	'0.6216	'0.6367	'0.6871	'0.6833	'0.6944
15	Tegalontar	'0.6159	'0.6254	'0.6594	'0.6444	'0.6944
16	Purwodadi	'0.6478	'0.6352	'0.6429	'0.6502	'0.6986

Sumber: Indeks Desa Membangun Kemendesa PDTT, 2024

Nilai skor Indeks Desa Membangun untuk masing-masing status desa adalah:

- Desa Sangat Tertinggal: $IDM \leq 0,4907$
- Desa Tertinggal; $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
- Desa Berkembang: $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
- Desa Maju: $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
- Desa Mandiri: $IDM > 0,8155$

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai idm desa di kecamatan sragi selalu dalam nilai skor idm berkembang, dari tahun ke tahun belum mengalami kenaikan yang signifikan dan bahkan terkadang ada penurunan dari nilai skor idm tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat disusun pertanyaan dalam penelitian dalam konteks pemetaan peran stakeholder, tingkatan sinergi, pengaruh sinergi, evaluasi proses kolaborasi dan rekomendasi strategis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemetaan peran dan tanggung jawab stakeholder (camat, sekcab, kasi PMD, pendamping desa dan kepala desa) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan pembangunan desa yang berfokus pada peningkatan IDM?
2. Sejauh mana tingkat Sinergi Antar-Stakeholder dalam aspek komunikasi, pembagian tugas, dan harmonisasi tujuan pembangunan desa, memengaruhi efektivitas pembangunan desa di Kecamatan Sragi?
3. Bagaimana sinergi antar-stakeholder berdampak pada peningkatan dimensi-dimensi IDM (sosial, ekoomi, dan lingkungan) di Kecamatan Sragi?
4. Bagaimana proses kolaborasi antar-stakeholder dalam pembangunan desa di Kecamatan Sragi dapat dievaluasi, khususnya terkait mekanisme koordinasi, pengambilan keputusan, dan resolusi konflik?
5. Apa rekomendasi strategis yang dapat diberikan untuk meningkatkan sinergi antar-stakeholder dalam mendukung pembangunan berbasis IDM di Kecamatan Sragi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dirumuskan maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Memetakan Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder dalam Meningkatkan IDM. Untuk memetakan peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder, termasuk camat, sekcab, kasi PMD, pendamping desa, dan

kepala desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan desa yang berfokus pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Sragi

2. Menganalisis Tingkat Sinergi Antar-Stakeholder. Untuk menganalisis tingkat sinergi antar-stakeholder dalam melaksanakan program pembangunan desa, dengan menilai sejauh mana komunikasi, pembagian tugas, dan harmonisasi tujuan dapat meningkatkan efektivitas pembangunan di Kecamatan Sragi.
3. Mengidentifikasi Pengaruh Sinergi terhadap Peningkatan IDM. Untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi pengaruh sinergi antar-stakeholder terhadap peningkatan dimensi-dimensi IDM (sosial, ekonomi, dan lingkungan) di Kecamatan Sragi, serta hubungan antara kualitas sinergi dan pencapaian pembangunan desa.
4. Mengevaluasi Proses Kolaborasi Antar-Stakeholder. Untuk mengevaluasi proses kolaborasi antar-stakeholder dalam pembangunan desa, dengan fokus pada mekanisme koordinasi, pengambilan keputusan, resolusi konflik, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan berbasis IDM.
5. Merumuskan Rekomendasi Strategis untuk Memperkuat Sinergi. Untuk merumuskan rekomendasi strategis berbasis temuan penelitian yang dapat memperkuat sinergi antar-stakeholder, dengan tujuan meningkatkan

efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa yang berbasis pada peningkatan IDM di Kecamatan Sragi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola kolaboratif dalam pembangunan desa, khususnya dalam konteks sinergi antar-stakeholder di tingkat kecamatan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori tentang kolaborasi, partisipasi, dan governance yang diterapkan dalam pembangunan berbasis Indeks Desa Membangun (IDM). Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan tentang kolaborasi antar-stakeholder dalam konteks desa dan pemerintahan lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis yang berguna bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait baik itu camat, sekcam, kasi PMD, dan pendamping desa untuk meningkatkan efektivitas sinergi antar-stakeholder di tingkat kecamatan, khususnya dalam rangka mempercepat peningkatan nilai IDM di Kecamatan Sragi. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu memperbaiki mekanisme koordinasi, meningkatkan pemahaman tentang IDM, dan mengoptimalkan

pembagian peran serta tanggung jawab antar-stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan pedoman bagi pendamping desa dalam mengelola hubungan kerja dengan pemerintah kecamatan dan desa, untuk menciptakan kolaborasi yang lebih produktif dan berkelanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Collaborative Governance

Collaborative Governance (Tata Kelola Kolaboratif) adalah sebuah pendekatan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks penyelesaian masalah yang kompleks dan bersifat lintas sektor, seperti pembangunan berkelanjutan, tata kelola lingkungan, dan pembangunan desa.

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), collaborative governance adalah proses pengelolaan dan pembuatan keputusan yang diinisiasi oleh pemerintah, tetapi mencakup keterlibatan multi-stakeholders dalam pengambilan keputusan dan implementasinya. Prinsip dasarnya adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

2.1.1 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Kolaboratif

Tata kelola kolaboratif (collaborative governance) merujuk pada pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan bersama. Model ini menekankan pentingnya kerja

sama dan koordinasi antar-stakeholder untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (Triviño-salazar 2023), tata kelola kolaboratif melibatkan empat prinsip dasar, yaitu:

1. Partisipasi: Semua stakeholder yang memiliki kepentingan terkait diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Transparansi: Proses pengambilan keputusan harus terbuka bagi semua pihak agar tercipta kepercayaan di antara stakeholder.
3. Keadilan: Semua pihak yang terlibat harus diperlakukan secara adil dan mendapatkan manfaat yang setara dari kebijakan atau program yang diimplementasikan.
4. Akuntabilitas: Setiap pihak yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil.

Tata kelola kolaboratif bertujuan menciptakan kesepakatan bersama dalam mengatasi masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, kolaborasi antar-stakeholder menjadi sangat penting dalam memecahkan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi (Bryson and Crosby 2015)

2.2 Faktor-Faktor Keberhasilan dan Hambatan Kolaborasi

Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi antar-stakeholder, antara lain:

1. Komunikasi yang Efektif: Terbuka dan jelasnya komunikasi antar-stakeholder merupakan kunci utama keberhasilan kolaborasi.
2. Kepercayaan Antar-Pihak: Kolaborasi membutuhkan kepercayaan antara stakeholder, baik dalam aspek proses maupun hasil.
3. Komitmen Bersama: Semua pihak harus memiliki visi dan misi yang sama serta komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Namun, kolaborasi sering menghadapi hambatan, seperti:

1. Perbedaan Prioritas: Setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda, yang bisa mengarah pada ketidakharmonisan.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Sumber daya yang terbatas bisa menghambat kelancaran kolaborasi.
3. Birokrasi yang Kompleks: Proses pengambilan keputusan yang lambat dan rumit sering menghambat pelaksanaan kolaborasi yang efektif (Gash 2014).

2.3 Konsep Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur untuk menilai status pembangunan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). IDM mencerminkan

kemajuan desa dalam berbagai dimensi pembangunan dan menjadi dasar dalam menentukan program intervensi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.3.1 Pengertian dan Penjabaran Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan desa dalam berbagai dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. IDM dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai acuan untuk memetakan status pembangunan desa secara holistik.

IDM terdiri dari beberapa indikator yang mencakup:

1. Dimensi Sosial: Mencakup aspek pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap layanan publik seperti air bersih dan sanitasi.
2. Dimensi Ekonomi: Mengukur aspek kesejahteraan ekonomi, tingkat pengangguran, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program pemberdayaan seperti UMKM.
3. Dimensi Lingkungan: Melihat kualitas lingkungan hidup, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sampah, dan keberlanjutan ekosistem.

Menurut Haryanto (Wijayanto and Ridwan 2024), peningkatan IDM dapat dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi antara sektor pemerintah dan

masyarakat, serta dukungan dari pendamping desa yang mampu mentransformasikan kebijakan menjadi program-program konkret yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

2.3.2 Dimensi IDM: Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

1. Dimensi Sosial: Berfokus pada akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, serta adanya program perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan.
2. Dimensi Ekonomi: Menilai tingkat kesejahteraan masyarakat desa dengan mengukur pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, serta peluang ekonomi yang tersedia di desa.
3. Dimensi Lingkungan: Berfokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti program penghijauan, sanitasi, dan pengelolaan air bersih yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

2.3.3 Kategori Status Desa Berdasarkan IDM

1. Desa Mandiri: Desa yang mampu mengelola potensi sumber daya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakatnya.
2. Desa Maju: Desa yang mendekati kemandirian, tetapi masih memerlukan beberapa intervensi.
3. Desa Berkembang: Desa dengan potensi berkembang namun masih menghadapi kendala dalam dimensi tertentu.

4. Desa Tertinggal: Desa dengan keterbatasan signifikan dalam infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
5. Desa Sangat Tertinggal: Desa yang memerlukan perhatian serius karena minimnya akses terhadap kebutuhan dasar.

2.4 Peran Stakeholder dalam Peningkatan IDM

Peran stakeholder dalam meningkatkan IDM sangat penting, terutama dalam mengoptimalkan partisipasi, koordinasi, dan implementasi kebijakan pembangunan di tingkat desa. Stakeholder yang terlibat dalam pembangunan desa antara lain:

1. Pemerintah Daerah (Kecamatan dan Desa): Memiliki kewajiban dalam merencanakan, mengalokasikan anggaran, serta memastikan program-program pembangunan yang tepat sasaran.
2. Pendamping Desa: Berperan sebagai fasilitator antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Soedirman and Purwokerto n.d.).
3. Masyarakat Desa: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, dengan memberikan masukan dan partisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Sinergi yang baik antara semua pihak akan mendorong peningkatan nilai IDM, karena kolaborasi ini memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya

sesuai dengan kebutuhan desa, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

2.5 Sinergi Antar-Stakeholder dalam Pembangunan Desa

Sinergi antar-stakeholder adalah proses kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan bersama, dalam hal ini meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM). Setiap stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab spesifik, yang jika dikelola dengan baik, dapat menciptakan hasil yang lebih besar dibandingkan kontribusi individual (Adekola and Moira 2021).

2.5.1 Pentingnya Harmonisasi Peran dalam Pembangunan Desa

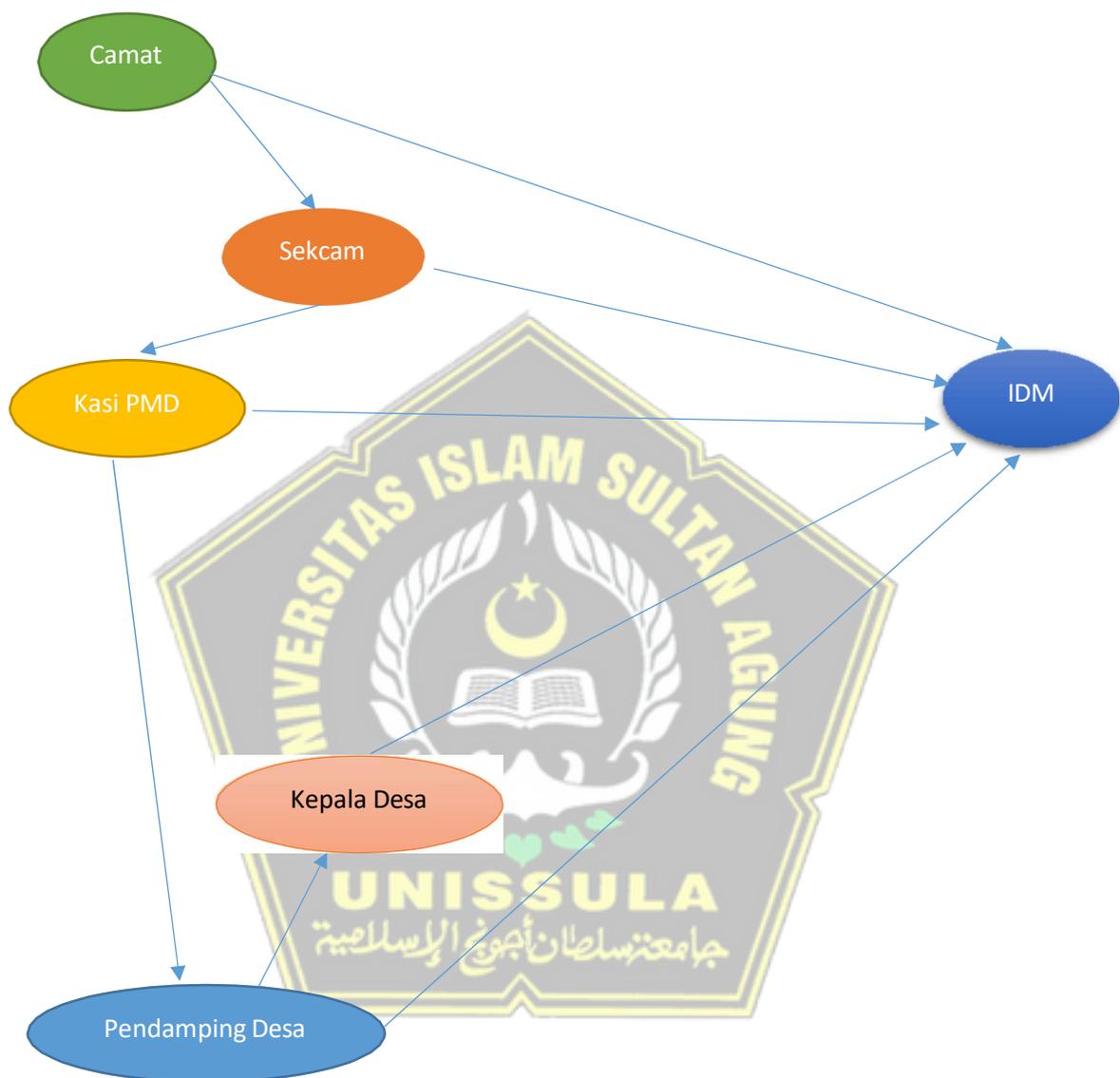
Harmonisasi peran antar-stakeholder merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan. Proses perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan desa harus melibatkan semua pihak yang relevan agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan efektif. Keterlibatan aktif dari pemerintah desa, pendamping desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi faktor utama dalam menciptakan kebijakan yang berbasis kebutuhan riil desa serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanpa adanya sinergi yang baik antar-stakeholder, pembangunan desa sering kali terhambat oleh kurangnya komunikasi, kesalahpahaman mengenai peran dan tanggung jawab, serta kurangnya komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, minimnya koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan, alokasi sumber daya yang tidak efektif, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Salah satu contoh sinergi yang berhasil adalah pembentukan forum koordinasi rutin antar-stakeholder, yang memungkinkan adanya pertukaran informasi, pemantauan kemajuan pembangunan, serta identifikasi masalah yang memerlukan penyelesaian bersama. Melalui sinergi ini, pembangunan desa dapat dilakukan dengan lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. Selain forum koordinasi, penyusunan rencana aksi bersama yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat harmonisasi peran. Dengan adanya pedoman yang jelas, setiap stakeholder dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dan bertanggung jawab.

penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi dan pelaporan juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan desa. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, setiap stakeholder dapat mengakses data perkembangan pembangunan secara real-time, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti. Harmonisasi peran ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), tetapi juga mendorong keberlanjutan pembangunan desa yang inklusif dan partisipatif.



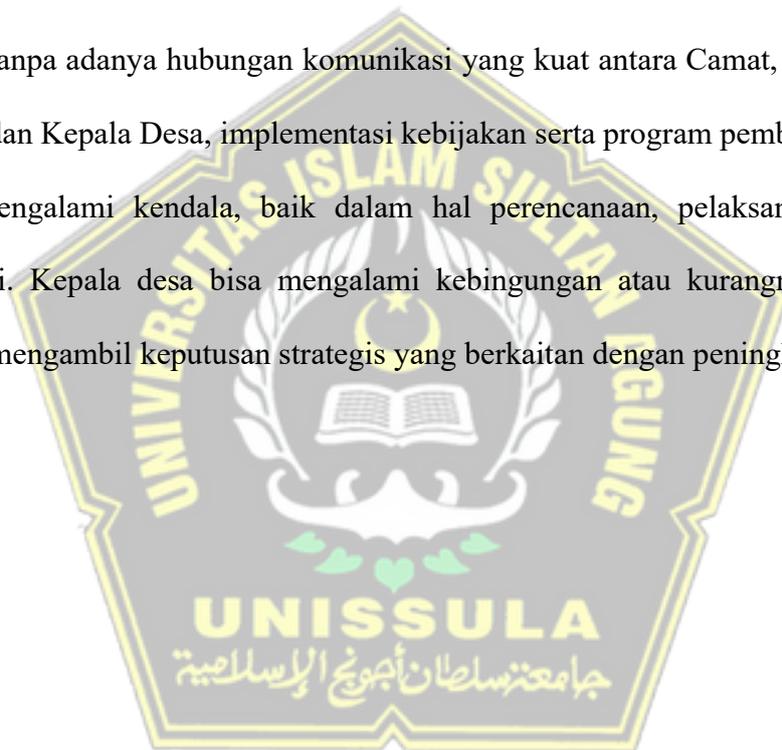
Gambar 2.5-1 Diagram Siergisitas Stakeholder dalam Peningkatan IDM

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa kurangnya sinergi yang terjalin antar stakeholder terutama antara pejabat kecamatan kepada kepala desa, sehingga kepala desa tidak langsung mendapatkan arahan, koordiasi dan dukungan strategis yang optimal dari tingkat kecamatan untuk meningkatkan IDM.

Kasi PMD yang seharusnya menjadi penghubung utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa tidak memiliki koneksi langsung dengan Kepala Desa dalam diagram ini.

Sekcam sebagai eksekutor kebijakan juga tidak terlihat memiliki jalur komunikasi yang erat dengan kepala desa, yang bisa menghambat efektivitas koordinasi program pembangunan.

Tanpa adanya hubungan komunikasi yang kuat antara Camat, Sekcam, Kasi PMD, dan Kepala Desa, implementasi kebijakan serta program pembangunan desa bisa mengalami kendala, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Kepala desa bisa mengalami kebingungan atau kurangnya dukungan dalam mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan peningkatan IDM.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, khususnya terkait sinergi antar-stakeholder dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Menurut Creswell 2014 (Title et al. n.d.), pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas dalam memahami konteks sosial dan mengungkap makna dari perspektif para informan.

3.2 Informan

Subjek penelitian atau informan yaitu individu-individu yang diwawancarai untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti terhadap suatu topik yang akan diteliti. Informasi dan data yang akan diperoleh akan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Dalam hal ini, informan memberikan pandangannya terhadap suatu nilai, sikap, proses, dan interaksi sosial yang berlangsung dalam penelitian ini (J. Moleong, 2014).

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan peran dan relevansi mereka terhadap topik penelitian. Teknik ini bertujuan memastikan data yang diperoleh berasal dari pihak-pihak yang

memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam konteks penelitian (qualitative-research-evaluation-methods-by-michael-patton.pdf n.d.). Informan yang terlibat sebanyak 10 orang dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Rincian Informan Penelitian

No	Informan/Stakeholder	Tugas
1	Camat Sragi	Memiliki peran sebagai koordinator pembangunan di tingkat kecamatan.
2	Sekretaris Camat (Sekcam) Sragi	Bertugas mengawasi implementasi program pembangunan desa.
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)	Memastikan pelaksanaan program sesuai dengan regulasi.
4	Pendamping Desa Kecamatan Sragi	Berperan dalam mendampingi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Eksekutif 2019).
5	Kepala Desa Bulaksari (Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Sragi	Memahami praktik pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa.
6	Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten Pekalongan	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa.

3.3 Lokasi

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kecamatan ini dipilih karena memiliki beragam karakteristik desa dengan tantangan pembangunan yang unik, sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif terkait implementasi sinergi antar-stakeholder dalam meningkatkan IDM .

3.4 Sumber Data

Terdapat dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2018). Pengumpulan data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari opini informan yang diteliti, berupa jawaban dari wawancara, hasil observasi terhadap objek yang diteliti dan hasil pengujian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua. Sumber datanya yaitu dari dokumen-dokumen tertulis, buku-buku teks, jurnal, artikel, majalah, dan berbagai hasil pembicaraan lain yang berfungsi untuk mendukung sumber objek dan objek primer (Prastowo, 2012). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang relevan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan wawancara yaitu membangun makna dalam suatu topik tertentu dengan bertemunya dua orang atau lebih yang saling bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab (Sugiyono, 2017). Pada wawancara kualitatif, peneliti melaksanakan wawancara secara langsung dengan narasumber.

Wawancara tersebut melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur dan umumnya terbuka tujuannya untuk memperoleh pandangan serta pendapat dari para narasumber (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti akan melaksanakan wawancara secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pertanyaan yang sistematis, jelas dan diarahkan sesuai Adapun panduan pertanyaan dalam sesi wawancara mendalam yang akan dilakukan adalah sebagaimana tabel berikut, untuk mendapatkan informasi terkait dengan:

- a. Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM.
- b. Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder.
- c. Kendala dalam sinergi dan solusi yang diterapkan.
- d. Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
- e. Masalah penelitian, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

Tabel 3.5.1 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Camat

No	Variable	Informan	Instrumen
I	Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM		
1	Peran strategis dalam peningkatan idm	Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa strategi utama yang Anda gunakan sebagai Camat untuk mengarahkan peningkatan IDM di seluruh desa di Kecamatan Sragi? 2. Dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, aspek mana yang menjadi

			<p>prioritas utama Anda, dan bagaimana langkah strategis untuk mencapainya?</p> <p>3. Bagaimana Anda memimpin kolaborasi antara kepala desa, pendamping desa, dan perangkat kecamatan untuk memastikan sinergi dalam mencapai target IDM?</p>
2	<p>Pendekatan dalam mendorong stakeholder</p>		<p>1. Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk memastikan semua stakeholder, seperti kepala desa, pendamping desa, dan perangkat kecamatan, memahami peran mereka dalam meningkatkan IDM?</p> <p>2. Apa metode atau mekanisme koordinasi yang Anda terapkan untuk menyatukan persepsi dan tindakan antara stakeholder dalam menjalankan program pembangunan desa?</p> <p>3. Bagaimana Anda memotivasi stakeholder untuk terlibat aktif dalam program-program yang mendukung peningkatan IDM?</p> <p>4. Jika terjadi hambatan komunikasi atau perbedaan pandangan antar-stakeholder, bagaimana pendekatan Anda dalam menyelesaikan masalah tersebut?</p>
3	<p>Prioritas dalam peningkatan IDM</p>		<p>1. Dalam upaya meningkatkan Indeks Desa Membangun, aspek sosial, ekonomi, atau lingkungan mana yang Anda anggap paling penting untuk diprioritaskan di Kecamatan Sragi, dan mengapa?</p> <p>2. Bagaimana Anda menentukan program-program pembangunan yang harus diprioritaskan untuk</p>

			<p>mendongkrak IDM di desa-desa Kecamatan Sragi?</p> <p>3. Bagaimana pendekatan Anda terhadap desa-desa yang memiliki tantangan lebih besar dalam meningkatkan IDM? Apakah ada kebijakan atau program khusus untuk desa dengan kendala tertentu?</p>
4	Monitoring dan evaluasi peran stakeholder		<p>1. Bagaimana Anda memantau pelaksanaan peran setiap stakeholder dalam program pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan IDM?</p> <p>2. Apa indikator yang Anda gunakan untuk mengevaluasi kinerja stakeholder dalam pencapaian Indeks Desa Membangun?</p> <p>3. Setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja stakeholder, langkah apa yang Anda ambil untuk mengatasi kekurangan atau masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program?</p>

Tabel 3.5.2 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Sekcam

No	Variable	Informan	Instrumen
II	Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder		
1	Frekuensi komunikasi antar stakeholder	Sekcam	<p>1. Seberapa sering anda mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi dengan stakeholder lainnya, seperti kepala desa, pendamping desa, atau pihak terkait lainnya?</p> <p>2. Apakah ada jadwal rutin atau forum tertentu yang disepakati untuk</p>

			<p>memastikan komunikasi antar-stakeholder berjalan dengan baik?</p> <p>3. Dalam menghadapi kendala atau permasalahan di lapangan, seberapa cepat komunikasi antar stakeholder dapat dilakukan untuk mencari solusi bersama?</p>
2	Jenis komunikasi yang digunakan		<p>1. Apa jenis komunikasi yang paling sering anda gunakan dalam berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, apakah tatap muka, telepon, atau melalui aplikasi digital seperti whatsapp atau telegram? (Sekcam)</p> <p>2. Apakah ada tantangan atau kendala yang anda temui terkait dengan jenis komunikasi tertentu dalam koordinasi antar-stakeholder? (Sekcam)</p>
3	Kualitas komunikasi antar-stakeholder		<p>1. Apakah kualitas komunikasi antar-stakeholder selama ini sudah mendukung upaya peningkatan IDM, terutama dalam menyelaraskan pemahaman tentang indikator IDM di tingkat sosial, ekonomi, dan lingkungan?</p> <p>2. Bagaimana komunikasi antar-stakeholder memengaruhi kemampuan desa untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang relevan dengan peningkatan dimensi IDM? Apakah ada hambatan yang mengurangi efektivitasnya?</p>

Tabel 3.5.3 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Kasi PMD

No	Variable	Informan	Instrumen
III	Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder		
1	Tingkat kolaborasi antar-stakeholder	Kasi PMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk kolaborasi antara stakeholder, seperti kecamatan, kepala desa, dan pendamping desa, dalam menyusun program yang secara langsung mendukung peningkatan indikator IDM? 2. Apakah ada mekanisme atau forum khusus yang digunakan untuk memastikan kolaborasi antar-stakeholder berjalan efektif dalam memonitor dan mengevaluasi pencapaian IDM? Jika ada, bagaimana mekanisme tersebut bekerja? 3. Sejauh mana Anda merasa bahwa kolaborasi antar-stakeholder saat ini telah mendukung tercapainya target peningkatan IDM? Apa saja yang perlu ditingkatkan agar kolaborasi tersebut lebih optimal?
2	Resolusi konflik dan penyelesaian masalah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara stakeholder, seperti kecamatan, kepala desa, atau pendamping desa, dalam menentukan prioritas program peningkatan IDM, bagaimana konflik tersebut biasanya diselesaikan? 2. Apakah terdapat prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program yang

			<p>berkaitan dengan IDM? Jika ada, bagaimana penerapannya?</p> <p>3. Bisakah Anda memberikan contoh kasus konflik yang pernah terjadi antara stakeholder terkait program IDM, dan bagaimana proses resolusi konflik tersebut memengaruhi hasil pembangunan desa?</p>
--	--	--	--

Tabel 3.5.4 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Ketua Paguyuban Kepala Desa

No	Variable	Informan	Instrumen
IV	Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM		
1	Prioritas dalam peningkatan IDM	Ketua Pauyuban Kepala Desa	<p>1. Dalam upaya meningkatkan Indeks Desa Membangun, aspek sosial, ekonomi, atau lingkungan mana yang Anda anggap paling penting untuk diprioritaskan di Kecamatan Sragi, dan mengapa?</p> <p>2. Bagaimana Anda menentukan program-program pembangunan yang harus diprioritaskan untuk mendongkrak IDM di desa-desa Kecamatan Sragi?</p> <p>3. Bagaimana pendekatan Anda terhadap desa-desa yang memiliki tantangan lebih besar dalam meningkatkan IDM? Apakah ada kebijakan atau program khusus untuk desa dengan kendala tertentu?</p>

V	Kendala dalam sinergi dan solusi yang diterapkan		
1	Hambatan pemahaman terhadap IDM	Ketua Pauyuban Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana pemahaman Anda terhadap tiga dimensi dalam Indeks Desa Membangun (sosial, ekonomi, dan lingkungan)? 2. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait indikator dan pengukuran IDM? Jika ya, bagaimana dampaknya terhadap peran Anda? 3. Apa kendala utama yang Anda alami dalam memahami indikator IDM dan cara penerapannya di desa? 4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kecamatan atau pihak lain untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang IDM? Apakah menurut Anda upaya tersebut sudah efektif?
2	Ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah peran dan tanggung jawab Anda dalam upaya peningkatan IDM sudah jelas? Bagaimana peran tersebut diintegrasikan dengan peran stakeholder lainnya? 2. Apakah Anda pernah mengalami tumpang tindih peran atau merasa ada kekosongan tanggung jawab yang seharusnya ditangani oleh stakeholder lain? Jika ya, bagaimana hal itu memengaruhi kinerja tim?

			3. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk menghindari ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab antar-stakeholder, terutama dalam konteks pengelolaan program IDM?
VI	Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan		
1	Mitigasi Risiko Bencana	Ketua Panyuban Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana koordinasi dan sinergi antar-stakeholder telah membantu mempersiapkan desa dalam menghadapi risiko bencana, seperti banjir atau kekeringan? 2. Program atau langkah mitigasi apa yang telah dilakukan melalui sinergi stakeholder, dan bagaimana dampaknya terhadap keamanan serta kesejahteraan masyarakat desa?

Tabel 3.5.5 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten

No	Variable	Informan	Instrumen
VII	Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan		
1	Peningkatan Kepercayaan	Koordinator Tenaga	1. Bagaimana Anda menilai tingkat kepercayaan antar-stakeholder, seperti kecamatan, kepala desa, dan pendamping desa, dalam proses perencanaan dan

	Antar-Stakeholder	Ahli Kabupaten	<p>pelaksanaan program peningkatan IDM?</p> <p>2. Apakah ada pengalaman atau strategi tertentu yang membantu membangun dan meningkatkan kepercayaan antar-stakeholder dalam upaya meningkatkan IDM?</p>
2	Peningkatan Kapasitas SDM Stakeholder		<p>1. Apa saja kebutuhan pengembangan kapasitas yang menurut Anda masih perlu dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas kerja dalam sinergi antar-stakeholder?</p> <p>2. Sejauh mana pelatihan atau pendampingan yang diberikan telah meningkatkan kapasitas Anda atau pihak lain dalam menjalankan peran untuk mendukung peningkatan IDM?</p>
3	Pertumbuhan Ekonomi Lokal		<p>1. Bagaimana sinergi antara stakeholder kecamatan, kepala desa, dan pendamping desa telah berkontribusi pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa-desa Anda?</p> <p>2. Program atau inisiatif apa yang telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan bagaimana kontribusi dari setiap stakeholder dalam pelaksanaannya?</p>

4	Kualitas Layanan Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sinergi antar-stakeholder telah membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial? 2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam memastikan layanan sosial yang berkualitas, dan bagaimana peran masing-masing stakeholder dalam mengatasinya
---	-------------------------	--	---

Tabel 3.5.6 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Pendamping Desa

No	Variable	Informan	Instrumen
VIII	Kendala dalam sinergi dan solusi yang diterapkan		
1	Kesenjangan komunikasi antar-stakeholder	Pendamping Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa sering Anda berkomunikasi dengan stakeholder lain (kecamatan, kepala desa, pendamping desa, atau tenaga ahli) dalam membahas program peningkatan IDM? 2. Apa saja kendala yang Anda alami dalam proses komunikasi dengan stakeholder lain, seperti perbedaan pemahaman atau kurangnya kejelasan informasi? 3. Menurut Anda, apakah mekanisme komunikasi yang

			<p>saat ini digunakan, seperti rapat koordinasi atau penggunaan teknologi, sudah memadai? Jika tidak, apa yang perlu ditingkatkan?</p>
2	Perbedaan Kepentingan dan Prioritas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Anda melihat perbedaan kepentingan dan prioritas antara stakeholder, seperti kecamatan, kepala desa, dan pendamping desa, dalam program peningkatan IDM? 2. Apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana perbedaan prioritas antara stakeholder menghambat pelaksanaan program pembangunan desa? Bagaimana masalah tersebut diselesaikan? 3. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan untuk menyelaraskan prioritas antar-stakeholder agar program peningkatan IDM berjalan lebih efektif?

Wawancara dilakukan secara tatap muka dan direkam dengan izin informan untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan komprehensif (Kvale & Brinkmann, 2009).

3.5.1 Observasi Partisipatif

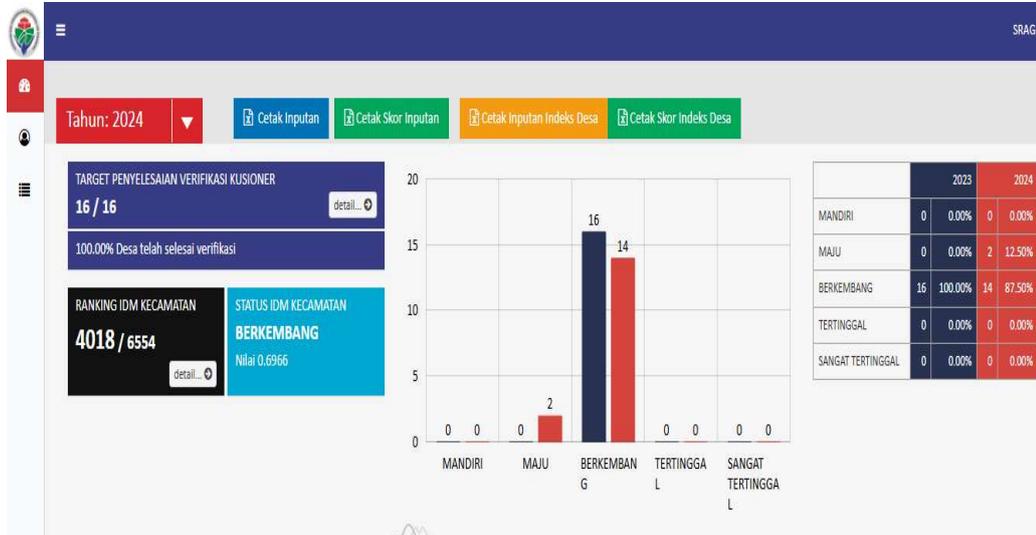
Peneliti mengamati secara langsung proses interaksi dan kolaborasi antar-stakeholder, seperti rapat koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan. Observasi ini bertujuan memahami dinamika sinergi secara kontekstual dan melengkapi data hasil wawancara.

3.5.2 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen tertulis, gambar, atau rekaman yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, sehingga dapat memperkuat validitas data dengan mengkaji sumber-sumber tertulis maupun visual yang relevan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, objektif, serta dapat diverifikasi dari berbagai sumber yang terdokumentasi.

Dokumen yang dianalisis mencakup beberapa data yang didapati dari beberapa sumber:

a. Data IDM Kecamatan Sragi



Gambar 3.5-1 Data IDM Kecamatan Sragi

Sumber: Data Indeks Desa Membangun, 2024

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM	Status IDM 2024	Target IDM 2025
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	KETANONAGENG	0.8057	0.6	0.6667	0.6908	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	MRICAN	0.72	0.75	0.6	0.69	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	BULAKSARI	0.8114	0.7	0.6	0.7038	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	SUMUBKIDUL	0.8114	0.6833	0.6667	0.7205	MAJU	MANDIRI
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	KALIJAMBE	0.7486	0.8	0.6	0.7162	MAJU	MANDIRI
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	SUMUBLOR	0.7143	0.7667	0.6	0.6937	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	KRSAKAGENG	0.7714	0.6167	0.6667	0.6849	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	SUERUK	0.7943	0.75	0.5333	0.6925	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	TEGALSURUH	0.7886	0.7667	0.5333	0.6962	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	BULAKPELEM	0.8057	0.6667	0.6	0.6908	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	GEBANGKEREPE	0.8	0.6833	0.6	0.6944	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	PURWOREJO	0.76	0.6667	0.6667	0.6978	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	KEDUNGIARAN	0.7429	0.7167	0.6	0.6865	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	KLUNJUKAN	0.8	0.6833	0.6	0.6944	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	TEGALONTAR	0.8	0.6833	0.6	0.6944	BERKEMBANG	MAJU
JAWA TENGAH	PEKALONGAN	SRAGI	PURWODADI	0.8457	0.65	0.6	0.6986	BERKEMBANG	MAJU

Gambar 3.5-2 Data Progress IDM Per Desa di Kecamatan Sragi 2024

Sumber: Data Indeks Desa Membangun, 2024

Dari kedua gambar idm diatas menunjukkan bahwa masih banyak desa yang skor idm nya berkembang, dimana Dana Desa sudah sudah berlangsung dari tahun 2015, tetapi desa masih dalam status berkembang dan belum banyak mengalami peningkatan dan perubahan yang signifikan.

Dibandingkan dengan kecamatan lain, nilai IDM di kecamatan Sragi termasuk dalam kondisi yang stagnan selama berlangsungnya dana desa, sedangkan di kecamatan lain setiap tahunnya minimal satu atau dua desa yang nilai Idm nya meningkat.

- b. Laporan pelaksanaan program pembangunan desa dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Lampiran 1

LAPORAN REKAPITULASI
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI : 33 PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : 33.28 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
REALISASI SID 31/12/2024

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBAYARAN NETTO			BILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
10	KECAMATAN SRAHI		28.730.776.794	29.300.045.141	102,0	28.907.232.762	29.202.800.981	101,0	176.455.968	222.826.814	126,3	0	320.070.978	0,0
10.2001.	PEMERINTAH DESA KETANONAGENI	2	1.503.825.799	1.495.855.737	99,5	1.527.156.058	1.518.167.096	99,4	23.330.289	23.330.299	100,0	0	1.118.942	0,0
10.2002.	PEMERINTAH DESA MRICAN	2	1.285.326.699	1.365.371.687	106,2	1.255.836.327	1.378.833.433	109,8	(29.492.372)	40.421.628	37,1	0	26.959.882	0,0
10.2003.	PEMERINTAH DESA BULAKSARI	2	2.183.408.241	2.311.877.981	105,9	2.184.026.070	2.307.315.071	105,6	617.829	1.235.658	200,0	0	5.798.568	0,0
10.2004.	PEMERINTAH DESA SUMUKIDUL	2	1.588.269.122	1.862.672.616	117,3	1.606.129.012	1.781.611.210	110,9	17.859.890	17.859.890	100,0	0	98.921.290	0,0
10.2005.	PEMERINTAH DESA KALIUMBEL	2	2.130.948.934	2.072.542.528	97,3	2.146.401.617	2.080.593.343	96,9	15.452.683	15.452.683	100,0	0	7.401.866	0,0
10.2006.	PEMERINTAH DESA SUMUBLOR	2	2.078.473.524	2.063.617.627	99,3	2.079.664.070	2.049.060.647	98,5	1.190.546	0	0,0	0	14.556.986	0,0
10.2007.	PEMERINTAH DESA KRISAKAGENG	2	2.214.680.619	2.193.102.236	99,0	2.216.879.777	2.174.981.469	98,1	2.199.158	2.199.158	100,0	0	20.319.524	0,0
10.2008.	PEMERINTAH DESA SIERUK	2	1.538.786.026	1.514.681.888	98,4	1.553.361.163	1.517.538.637	97,7	14.575.137	14.575.137	100,0	0	11.718.388	0,0
10.2009.	PEMERINTAH DESA TEGALSURUH	2	1.619.588.981	1.711.052.207	105,6	1.635.276.651	1.713.513.233	104,8	15.687.670	4.441.116	28,3	0	1.980.090	0,0
10.2010.	PEMERINTAH DESA BULAKPELEM	2	2.144.687.554	2.125.631.172	99,1	2.152.253.236	2.129.358.469	98,9	7.565.682	7.565.682	100,0	0	3.838.388	0,0
10.2011.	PEMERINTAH DESA GEBANGKEREPE	2	2.105.056.750	2.188.936.588	104,0	2.185.462.505	2.203.593.802	100,8	80.405.755	85.298.376	106,1	0	70.641.154	0,0
10.2012.	PEMERINTAH DESA PURWOREJO	2	1.790.479.175	1.782.275.216	99,5	1.797.338.064	1.772.040.188	98,6	6.858.889	6.858.889	100,0	0	17.093.917	0,0
10.2013.	PEMERINTAH DESA KEDUNGLARAN	2	1.528.803.500	1.506.416.336	98,5	1.530.858.633	1.506.344.122	98,4	2.055.133	2.055.133	100,0	0	2.127.347	0,0
10.2014.	PEMERINTAH DESA KLUNAIKAN	2	1.668.756.310	1.809.115.306	108,4	1.671.486.281	1.788.486.231	107,0	2.729.975	0	0,0	0	20.629.066	0,0
10.2015.	PEMERINTAH DESA TEGALONTAR	2	1.890.843.730	1.857.145.524	98,2	1.904.730.259	1.844.650.182	96,8	13.886.529	0	0,0	0	12.495.342	0,0
10.2016.	PEMERINTAH DESA PURWODADI	2	1.458.839.870	1.439.650.516	98,7	1.460.373.695	1.436.713.848	98,4	1.533.165	1.533.165	100,0	0	4.469.833	0,0
	JUMLAH		28.730.776.794	29.300.045.141	102,0	28.907.232.762	29.202.800.981	101,0	176.455.968	222.826.814	126,3	0	320.070.978	0,0

KODE POSTING :
2 : APBDAS AWAL
3 : PERKADES I BEBELUM PERUBAHAN
4 : APBDAS I PERUBAHAN
6 : PERKADES I BETAH PERUBAHAN

Kajen, 18 Desember 2024
Plt. Bupati Kabupaten Pekalongan

Wildi Harlanjo

Printed by Siskeudes | Rekapitulasi/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Halaman 1

Gambar 3.5-3 Data Penyerapan Dana Desa 2024

Sumber: Sistem Keuangan Desa dari Aplikasi Kementerian Dalam Negeri, 2024

Gambar diatas adalah laporan penyerapan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada didesa melalui sistim keuangan desa (Siskeudes). Penyerapan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun, masih ada beberapa kegiatan yang belum terserap dengan baik. Sehingga menjadi masalah tersendiri dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang ada di desa.

c. Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dari aplikasi Monev DD.

No	ID DESA	DESA	Kegiatan 1419143								Kegiatan 1419143									
			Anggaran				Kegiatan				Anggaran				Kegiatan					
			K/Desa (Rp)	Revisi	Terserap	%	Jumlah	Verifikasi	Progres	K/Desa (Rp)	Revisi	Terserap	%	Jumlah	Verifikasi	Progres				
TOTAL KCS. 1940			10.271.623.500,00	10.271.623.500,00	10.271.623.500,00	99,95	777	776	1	99,44	99,54	5.193.844.800,00	5.193.844.800,00	5.193.844.800,00	99,75	231	229	2	99,10	99,30
1	102000001	> KEMAMNGING	476.400,00	476.400,00	476.400,00	100,00	5	5	0	100,00	100,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	100,00	5	5	0	100,00	100,00
2	102000002	> MBLAN	555.100,00	555.100,00	555.100,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00
3	102000003	> BELAKAR	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00
4	102000004	> KALUMATI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	1	1	0	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	1	1	0	100,00	100,00
5	102000005	> KALUMATI	488.700,00	488.700,00	488.700,00	100,00	15	15	0	100,00	100,00	244.350,00	244.350,00	244.350,00	100,00	15	15	0	100,00	100,00
6	102000006	> SIKARANG	975.000,00	975.000,00	975.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00
7	102000007	> KEMAMNGING	770.000,00	770.000,00	770.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00
8	102000008	> SUTUR	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00
9	102000009	> TEGALWARAH	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00
10	102000010	> SELAYUBAN	948.000,00	948.000,00	948.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00
11	102000011	> SEBANGSOP	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00	1	1	0	100,00	100,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00	1	1	0	100,00	100,00
12	102000012	> PANGRANG	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00
13	102000013	> KEDUNGWARAH	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00	1	1	0	100,00	100,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	100,00	1	1	0	100,00	100,00
14	102000014	> SELAYUBAN	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00
15	102000015	> TEGALWARAH	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00
16	102000016	> PANGRANG	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	10	10	0	100,00	100,00
TOTAL			10.271.623.500,00	10.271.623.500,00	10.271.623.500,00	99,95	777	776	1	99,44	99,54	5.193.844.800,00	5.193.844.800,00	5.193.844.800,00	99,75	231	229	2	99,10	99,30

Gambar 3.5-4 Data Realisasi Dana Desa Kementerian Desa PDTT

Sumber: Aplikasi Monev Dana Desa dari Kementerian Desa PDTT, 2024

Gambar diatas adalah data penyerapan dana desa tahun 2024 yang terdiri dari data pembangunan fisik dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh desa dan dilaporkan melalui aplikasi Monev DD Kemendesa PDTT.

d. Laporan penyerapan kegiatan pembangunan desa dari Aplikasi Omspan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PEMDA KAB. PEKALONGAN

DATA PENYERAPAN DANA DESA - SUMMARY DESA

NO	PEMDA	DESA	REALISASI
1	0305 - KAB. PEKALONGAN	Bulakpelem, Kec.Sragi - 3326102010	443.684.200
2	0305 - KAB. PEKALONGAN	Bulaksari, Kec.Sragi - 3326102003	1.161.483.600
3	0305 - KAB. PEKALONGAN	Gebangkerop, Kec.Sragi - 3326102011	258.608.000
4	0305 - KAB. PEKALONGAN	Kaliamba, Kec.Sragi - 3326102005	438.750.000
5	0305 - KAB. PEKALONGAN	Kedungjaram, Kec.Sragi - 3326102013	770.112.000
6	0305 - KAB. PEKALONGAN	Ketanonageng, Kec.Sragi - 3326102001	758.890.000
7	0305 - KAB. PEKALONGAN	Klunjukan, Kec.Sragi - 3326102014	940.949.400
8	0305 - KAB. PEKALONGAN	Kosakageng, Kec.Sragi - 3326102007	542.436.200
9	0305 - KAB. PEKALONGAN	Mrican, Kec.Sragi - 3326102002	389.690.600
10	0305 - KAB. PEKALONGAN	Purwodadi, Kec.Sragi - 3326102016	383.259.200
11	0305 - KAB. PEKALONGAN	Punorejo, Kec.Sragi - 3326102012	901.105.000
12	0305 - KAB. PEKALONGAN	Siteruk, Kec.Sragi - 3326102008	899.241.000
13	0305 - KAB. PEKALONGAN	Sumubiktil, Kec.Sragi - 3326102004	404.909.400
14	0305 - KAB. PEKALONGAN	Sumublor, Kec.Sragi - 3326102006	1.006.997.000
15	0305 - KAB. PEKALONGAN	Tegalantar, Kec.Sragi - 3326102015	1.187.260.000
16	0305 - KAB. PEKALONGAN	Tegalunuh, Kec.Sragi - 3326102009	432.263.600
Jumlah			10.879.639.200

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 04-02-25 12:57:13 oleh : PEMDA KAB. PEKALONGAN

Gambar 3.5-5 Data Penyerapan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Sumber: Aplikasi Omspan Kabupaten Pekalongan, 2024

Gambar diatas merupakan laporan keuangan dari dana desa yang telah diserap dan dilaksanakan oleh desa selama satu tahu, apakah telah diserap semuanya atau masih menyisakan anggaran atau silpa.

Studi dokumentasi ini memberikan landasan faktual untuk mendukung hasil analisis kualitatif.

3.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dirangkum, disaring, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk mempermudah interpretasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Proses ini dilakukan secara literatif dengan validasi data dari berbagai sumber.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sragi terletak di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dan terdiri dari beberapa desa dengan karakteristik yang beragam, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi berbasis pertanian, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menjadi sektor utama dalam pengembangan desa. Selain itu, Kecamatan Sragi juga menghadapi tantangan dalam peningkatan infrastruktur dasar dan akses layanan sosial, terutama di desa-desa dengan kategori berkembang dan tertinggal menurut Indeks Desa Membangun (IDM). Dengan adanya berbagai dinamika ini, penelitian ini berfokus pada bagaimana sinergi antar-stakeholder dapat meningkatkan IDM dan mempercepat pembangunan desa yang lebih berkelanjutan.

4.2 Temuan Penelitian

4.2.1 Pengumpulan Data

Data yang diperoleh merupakan data dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang merupakan stakeholder terkait dan memahami kontribusi masing-masing dalam proses pembangunan desa. Dalam konteks peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), stakeholder yang terlibat terdiri dari pemerintah kecamatan,

pendamping desa, kepala desa, masyarakat desa, serta pihak lain seperti tenaga ahli kabupaten.

Berikut adalah Berikut adalah data informan yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 Analisis Deskripsi Informan

Informan	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan	Atasan Langsung
1	Laki-Laki	54 tahun	Camat	Bupati
2	Laki-Laki	52 tahun	Sekcan	Camat
3	Perempuan	48 tahun	Kasi PMD	Camat
4	Laki-Laki	32 tahun	Pendamping Desa	Tenaga Ahli Kabupaten
5	Laki-Laki	53 tahun	Kepala desa Bulaksari	Camat
6	Perempuan	42 tahun	Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten	Koordinator Tenaga Ahli Provinsi

Implementasi Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder dalam Meningkatkan IDM terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu

1. Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder dalam Meningkatkan IDM

Setiap stakeholder dalam pembangunan desa memiliki peran yang spesifik berdasarkan tugas pokok dan fungsi mereka. Dalam konteks peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), peran ini dapat diidentifikasi melalui tahapan perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Berikut adalah

penjelasan rinci tentang peran masing-masing stakeholder dan tingkat efektivitasnya.

Tabel 4.2.2 Peran spesifik stakeholder dan Efektifitas

Stakeholder	Peran Spesifik	Tingkat Efektivitas
Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasi kebijakan pembangunan antar desa dan kecamatan 2. Menetapkan prioritas pembangunan 3. Memastikan sinkronisasi program pemerintah daerah dan desa 	<p>Tinggi, karena Camat memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasi semua kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan.</p>
Sekcam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Camat dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan 	<p>Moderat, karena lebih berfokus pada implementasi program dan komunikasi antar</p>

	<p>2. Menjadi penghubung antara pemerintah kecamatan dan desa.</p>	<p>stakeholder tingkat kecamatan dan desa.</p>
Kasi PMD	<p>1. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>2. Membimbing kepala desa dalam penerapan kebijakan pembangunan.</p>	<p>Tinggi, berperan sebagai penggerak dalam memastikan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik di desa-desa.</p>
Pendamping Desa	<p>1. Memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat desa dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan.</p> <p>2. Membantu dalam pengelolaan sumber daya dan pendanaan desa.</p>	<p>Tinggi, karena pendamping desa terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan menjadi fasilitator dalam peningkatan kapasitas masyarakat.</p>

Ketua Paguyuban Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. 2. Memastikan adanya kolaborasi antar-stakeholder di desa. 	Tinggi, karena kepala desa memiliki peran utama dalam manajemen sumber daya dan pengambilan keputusan penting yang langsung mempengaruhi hasil pembangunan desa.
Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan teknis dan rekomendasi strategis dalam penyusunan program pembangunan di desa. 2. Menyediakan dukungan teknis dalam berbagai aspek pembangunan. 	Tinggi, karena Koordinator Tenaga Ahli berperan penting dalam memberikan rekomendasi berbasis data dan keahlian untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan desa.

2. Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder.

Sinergi dalam konteks pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder. Desain deskriptif kualitatif digunakan untuk mengevaluasi:

- a. Frekuensi dan kualitas komunikasi: Apakah komunikasi dilakukan secara rutin, informal, atau hanya pada momen tertentu seperti rapat koordinasi.

- b. Alat komunikasi yang digunakan: Apakah stakeholder memanfaatkan teknologi seperti WhatsApp, email, telepon atau rapat formal untuk menyampaikan informasi.
- c. Harmonisasi visi: Mengukur sejauh mana stakeholder memiliki pemahaman yang sama tentang target IDM.

3. Kendala dan solusi dalam sinergi.

Setiap bentuk kerja sama menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan mengungkap:

- a. Kendala struktural: Misalnya, keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas SDM, atau regulasi yang tidak fleksibel.
- b. Kendala sosial: Misalnya, konflik kepentingan antar-stakeholder, ketidakpercayaan, atau minimnya partisipasi masyarakat desa.

Selain mengidentifikasi kendala, pendekatan ini juga menggali solusi yang telah diterapkan, seperti:

- a. Pelatihan bersama: Untuk meningkatkan pemahaman tentang IDM dan tata kelola.
- b. Rapat koordinasi berbasis data: Untuk memastikan semua stakeholder memiliki referensi yang sama dalam pengambilan keputusan.

Analisis ini memberikan wawasan yang dapat diterapkan dalam konteks lain untuk mengatasi kendala kolaborasi.

4. Dampak Sinergi terhadap IDM dari Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Desain deskriptif kualitatif digunakan untuk mengevaluasi dampak sinergi terhadap kenaikan IDM. Sinergi yang baik biasanya berdampak pada:

- a. Dimensi sosial: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan akses layanan publik.
- b. Dimensi ekonomi: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan, seperti pelatihan usaha dan ketrampilan.
- c. Dimensi lingkungan: Implementasi program kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Indikator dari peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

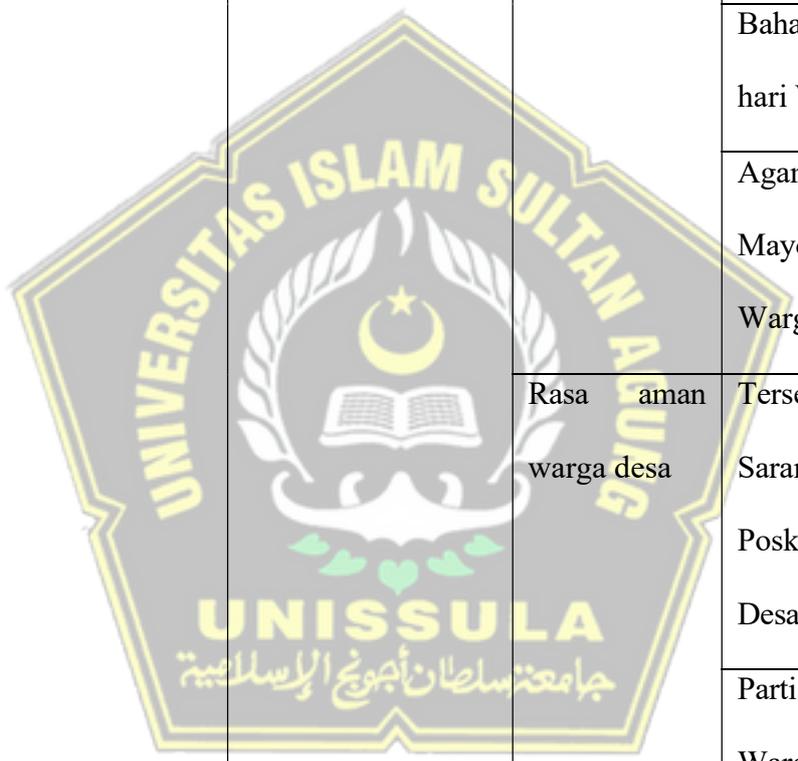
Tabel 4.2.3 Indikator Indeks Desa Membangun

No	Indeks Komposit	Dimensi	Perangkat Indikator	Indikator Peritem
1	SOSIAL (IKS)	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan	Jarak ke sarana kesehatan terdekat Ketersediaan Tenaga Kesehatan (

				Bidan, Dokter, dan Nakes lainnya)
			Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu
				Tingkat Aktivitas Posyandu
			Jaminan Kesehatan	Tingkat kepesertaan BPJS
		PENDIDIKAN	Akses Pendidikan Dasar- Menengah	Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 Km
				Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 Km

			Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 Km
			Akses Pendidikan Non-Formal Kegiatan PAUD Kegiatan PKBM/Paket A-B-C Kegiatan Kursus
			Akses Pengetahuan Masyarakat Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
		MODAL SOSIAL	Solidaritas Kebiasaan Gotong Royong Keterbukaan Ruang Publik
			Sosial Terdapat Kelompok Olahraga

				Terdapat Kegiatan Olahraga
			Toleransi	Keberagaman Suku/Etnis di Desa
				Bahasa Sehari-hari Warga Desa
				Agama Mayoritas Warga Desa
			Rasa aman warga desa	Tersedianya Sarana Poskamling di Desa
				Partisipasi Warga Siskamling
				Kejadian Perkelahian Massal di Desa



			Kesejahteraan Sosial	<p>Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa</p> <p>Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis)</p>
		PERMUKIMAN	Akses Air Bersih dan Layak Minum	<p>Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air Layak Minum</p> <p>Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci</p>
			Akses ke Fasilitas Sanitasi	<p>Mayoritas Warga Memiliki Jamban</p> <p>Terdapat Tempat</p>

				Pembuangan Sampah
			Akses ke Fasilitas Listrik	Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik
			Akses Fasilitas Informasi dan Komunitas	Warga Memiliki Telepon Seluler dan Sinyal Kuat
				Akses Internet di Kantor Desa
				Terdapat Akses Internet untuk warga
2	EKONOMI (IKE)	KERAGAMAN PRODUKSI	Keragaman produksi Masyarakat Desa	Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk
		PERDAGANGAN		Akses Penduduk ke Pusat

			Tersedianya Pusat Perdagangan	Perdagangan (pertokoan, Pasar Permanen)
				Terdapat Psar Desa
				Terdapat Sektor Perdagangan (arung Minimarket)
		AKSES DISTRIBUSI	Akses Distribusi Logistik	Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik
		AKSES KREDIT		Tersedianya Lembaga Perbankan Umum dan PBR
				Akses Penduduk ke Kredit
		LEMBAGA EKONOMI	Lembaga Ekonomi	Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat

				(Koperasi) / Bumdesa
				Terdapat usaha Kedai Makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan
		KETERBUKAAN WILAYAH	Keterbukaan Wilayah	Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)
				Jalan yang Dapat dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
				Kualitsa Jalan Desa
3	LINGKUNGAN (IKL)	KUALITAS LINGKUNGAN	Kualitas Lingkungan	Pencemaran Air, Udara dan Tanah

		POTENSI DAN TANGGAP BENCANA	Potensi Rawan Bencana	Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan)
			Tanggap Bencana	Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam

Sumber: Indikator Indeks Desa Membangun

Penelitian ini juga mengidentifikasi keterkaitan antara tingkat sinergi dan peningkatan nilai IDM. Misalnya, sinergi yang kuat dalam implementasi program seringkali berkontribusi pada keberhasilan dalam memenuhi indikator pembangunan.

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini diuraikan mengenai hasil observasi, hasil wawancara, hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian yang berfokus pada sinergi antara stakeholder kecamatan dan pendamping desa dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu stakeholder yang berperan aktif dalam proses peningkatan IDM, seperti Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa (Kasi PMD), Kepala Desa, Pendamping Desa, dan Tenaga Ahli Kabupaten.

Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan bagian integral dari upaya pembangunan desa yang berkelanjutan, bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan multidimensional yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kecamatan Sragi, sebagai lokasi penelitian ini, memiliki karakteristik unik yang mencerminkan beragam tantangan serta peluang dalam meningkatkan IDM di desa-desa yang berada dalam wilayah administratifnya. Dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang bervariasi, setiap desa di Kecamatan Sragi menghadapi tantangan yang berbeda-beda dalam meningkatkan status IDM-nya, sehingga dibutuhkan strategi yang adaptif dan berbasis pada kebutuhan lokal.

Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga pada efektivitas sinergi antar-stakeholder dalam mengimplementasikan program pembangunan secara konkret di lapangan. Pemerintah kecamatan, kepala desa, pendamping desa, serta tenaga ahli kabupaten memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan dan harus dijalankan dengan optimal untuk mencapai target peningkatan IDM. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana interaksi antar-stakeholder berjalan, strategi apa yang diterapkan dalam menghadapi berbagai kendala, serta bagaimana efektivitas kolaborasi dapat

ditingkatkan agar program-program pembangunan desa lebih berdampak secara nyata.

Sebagai bagian dari metode penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program peningkatan IDM. Melalui wawancara ini, diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana peran masing-masing stakeholder dijalankan, bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi diterapkan, serta bagaimana mereka merespons berbagai kendala yang muncul selama proses pembangunan desa. Wawancara juga mengungkapkan sejauh mana efektivitas program-program pembangunan yang telah berjalan, baik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa maupun dalam memperbaiki indikator-indikator IDM yang menjadi tolok ukur kemajuan desa.

Hasil wawancara ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai dinamika kerja sama antar-stakeholder, tetapi juga mengungkap berbagai faktor penghambat yang sering muncul dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Kendala seperti perbedaan prioritas antar-pemangku kepentingan, kurangnya pemahaman yang seragam mengenai indikator IDM, hingga keterbatasan sumber daya dan pendanaan menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi perbaikan ke depan. Selain itu, wawancara juga memberikan wawasan mengenai bagaimana setiap stakeholder mengatasi perbedaan pandangan serta

bagaimana mereka menyusun solusi yang paling memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa.

Selain membahas tantangan, wawancara ini juga mengungkap berbagai strategi yang telah diterapkan dalam meningkatkan IDM di Kecamatan Sragi. Dari perspektif Camat dan perangkat kecamatan, misalnya, diketahui bahwa pendekatan berbasis koordinasi lintas sektor menjadi salah satu strategi utama dalam memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan secara harmonis dan terintegrasi. Sementara itu, kepala desa dan pendamping desa memberikan wawasan mengenai bagaimana program-program tersebut diimplementasikan di tingkat desa serta bagaimana respons masyarakat terhadap upaya pembangunan yang dilakukan.

Lebih jauh, wawancara ini juga membahas sejauh mana sinergi antar-stakeholder berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan desa. Dengan menggali pengalaman langsung dari para pelaku pembangunan desa, penelitian ini dapat menyajikan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan program peningkatan IDM.

Dengan demikian, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya menjadi sumber data utama, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk memahami dinamika sinergi antar-stakeholder dalam konteks pembangunan desa. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian

berikut, dengan fokus pada aspek-aspek utama yang menjadi perhatian penelitian, termasuk peran stakeholder, tingkat komunikasi dan kolaborasi, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari sinergi yang telah terbentuk terhadap peningkatan IDM di Kecamatan Sragi.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran dan sinergi antar-stakeholder dalam meningkatkan IDM. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih, yang diwawancarai berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan variabel penelitian. Selain itu, observasi serta analisis dokumen juga dilakukan guna memperkaya temuan penelitian ini.

Dalam tahap analisis, peneliti membuat daftar pertanyaan wawancara yang disusun berdasarkan aspek utama dalam peningkatan IDM, meliputi peran dan tanggung jawab stakeholder, tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder, kendala yang dihadapi dalam sinergi, serta dampak sinergi terhadap peningkatan IDM dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai pola sinergi dan efektivitas kolaborasi antar-stakeholder di Kecamatan Sragi.

Peneliti juga melakukan beberapa tahapan wawancara yang difokuskan pada peran masing-masing stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga

evaluasi program peningkatan IDM. Selain itu, wawancara ini juga menggali berbagai tantangan yang dihadapi serta solusi yang telah diterapkan oleh masing-masing stakeholder dalam membangun sinergi untuk mencapai target pembangunan desa yang lebih baik. Adapun jawaban masing-masing informan akan disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2.4 Rekapitulasi Instrumen dan Jawaban Informan Camat

No	Variable	Informan	Instrumen
I	Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM		
1	Peran strategis dalam peningkatan idm	Camat	<p>1. Apa strategi utama yang Anda gunakan sebagai Camat untuk mengarahkan peningkatan IDM di seluruh desa di Kecamatan Sragi?</p> <p><i>Jadi, kalau bicara soal strategi, yang pertama dan paling utama menurut saya adalah memastikan semua desa punya pemahaman yang sama tentang pentingnya IDM. Kadang kan ada desa yang fokusnya masih ke hal lain, jadi tugas kami di kecamatan adalah mengarahkan agar program-program yang mereka jalankan juga berdampak langsung ke peningkatan IDM.</i></p> <p><i>Saya juga selalu mendorong sinergi antara kepala desa, pendamping desa, dan perangkat kecamatan. Kami sering mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi perkembangan setiap desa dan memastikan mereka dapat dukungan yang dibutuhkan. Selain itu, pendekatan berbasis data juga penting. Kami melihat indikator mana yang</i></p>

		<p><i>masih lemah di tiap desa, lalu fokus memperbaikinya dengan program yang tepat, misalnya soal ekonomi desa, pendidikan, dan infrastruktur atau kita tahu bersama bahwa sragi sering terjadi banjir sehingga pembangunan berbasis lingkungan menjadi prioritas untuk meningkatkan IDM. Jadi, strateginya lebih ke kombinasi koordinasi yang baik, pemanfaatan data yang akurat, dan tentunya pendampingan yang intensif untuk desa-desa yang masih perlu perhatian lebih</i></p> <p><i>2. Dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, aspek mana yang menjadi prioritas utama Anda, dan bagaimana langkah strategis untuk mencapainya?</i></p> <p><i>Kalau melihat kondisi di Sragi, sebenarnya ketiga aspek ini saling berkaitan, tapi yang kami prioritaskan saat ini adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan, terutama karena beberapa desa di Sragi sering mengalami banjir.</i></p> <p><i>Di bidang ekonomi, kami berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan UMKM dan optimalisasi BUMDes. Ini penting karena dengan ekonomi yang kuat, daya beli masyarakat meningkat, dan itu akan berdampak ke aspek lainnya.</i></p> <p><i>Dari sisi sosial, fokus kami adalah meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Kami terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan desa untuk menekan angka putus sekolah, serta memperkuat layanan kesehatan di tingkat desa melalui posyandu</i></p>
--	--	---

		<p>dan Puskesmas. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa agar mereka lebih peduli dengan kemajuan daerahnya sendiri.</p> <p>Nah, untuk lingkungan, ini juga sangat krusial, karena ada beberapa desa di Sragi yang sering terkena banjir. Kami sudah mulai mengambil langkah-langkah strategis seperti pengerukan sungai, perbaikan saluran drainase, serta mendorong desa agar lebih aktif dalam program mitigasi bencana. Kami juga bekerja sama dengan BPBD untuk memberikan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat, supaya mereka lebih siap ketika menghadapi kondisi darurat. Ke depan, kami ingin memastikan bahwa setiap desa punya rencana mitigasi bencana yang lebih sistematis, supaya dampak banjir bisa diminimalisir.</p> <p>Jadi, intinya kami melihat semua aspek ini penting, tapi ekonomi, sosial, dan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan banjir menjadi prioritas utama kami untuk saat ini.</p> <p>3. Bagaimana Anda memimpin kolaborasi antara kepala desa, pendamping desa, dan perangkat kecamatan untuk memastikan sinergi dalam mencapai target IDM?</p> <p>Ya, kalau bicara soal kolaborasi, kuncinya itu ada di komunikasi dan kebersamaan. Saya selalu tekankan ke teman-teman kepala desa, pendamping desa, dan perangkat kecamatan bahwa ini bukan kerja individu, tapi kerja tim. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, pasti berat,</p>
--	--	---

		<p><i>tapi kalau bareng-bareng, hasilnya bisa lebih maksimal.</i></p> <p><i>Saya koordinasikan dulu dengan Sekcam dan bu Kasi PMD, bagaimana yang harus dilakukan, seterusnya baru kita adakan pertemuan dengan pendamping dan kepala desa.</i></p> <p><i>Biasanya, saya mulai dari menyamakan persepsi dulu. supaya kita punya pemahaman yang sama soal IDM ini. Apa yang harus ditingkatkan, di mana kendalanya, dan bagaimana solusinya. Jadi, setiap desa tahu apa yang harus dilakukan, dan pendamping desa juga paham bagaimana cara mendukungnya.</i></p> <p><i>Pendamping desa juga kita libatkan aktif, karena mereka yang lebih dekat dengan masyarakat dan tahu langsung kondisi di lapangan.</i></p> <p><i>Yang nggak kalah penting, saya selalu dorong keterbukaan. Saya sering bilang ke kepala desa dan perangkat kecamatan, kalau ada masalah, jangan dipendam, jangan sungkan buat cerita. Dengan begitu, kita bisa cari jalan keluar lebih cepat. Dengan pendekatan ini, saya harap ke depannya kerja sama antara kecamatan, desa, dan pendamping desa jadi lebih solid. Semua punya peran masing-masing, tapi tujuannya tetap sama bagaimana supaya IDM di Sragi ini terus meningkat.</i></p>
2	Pendekatan dalam mendorong stakeholder	<p>1. Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk memastikan semua stakeholder, seperti kepala desa, pendamping desa, dan perangkat</p>

		<p>kecamatan, memahami peran mereka dalam meningkatkan IDM?</p> <p><i>pertama tentu saja, saya pastikan semua pihak paham dulu apa itu IDM dan kenapa ini penting. Karena kalau nggak ngerti tujuannya, ya susah untuk bergerak bareng. Di sini, saya jelaskan bagaimana peran masing-masing, mulai dari kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, sampai masyarakat.</i></p> <p><i>Setelah itu, kita juga buat pembagian tugas yang jelas. Misalnya, kepala desa fokus pada kebijakan dan penganggaran, perangkat desa menangani administrasi dan pelaksanaan program, sementara pendamping desa lebih banyak membantu dalam perencanaan dan teknis di lapangan. Dengan begini, nggak ada yang bingung soal perannya.</i></p> <p><i>saya juga dorong supaya ada sharing pengalaman antar desa. Jadi, kalau ada desa yang sudah berhasil meningkatkan IDM-nya, kita bisa jadikan contoh buat desa lain. Misalnya, ada desa yang sukses dalam pengelolaan BUMDes atau penanganan stunting, ya kita ajak desa lain belajar dari situ. Dengan cara ini, semua stakeholder bisa saling mengisi dan makin paham bagaimana peran mereka dalam mendorong pembangunan desa.</i></p> <p>2. Apa metode atau mekanisme koordinasi yang Anda terapkan untuk menyatukan persepsi dan tindakan antara stakeholder dalam menjalankan program pembangunan desa?</p>
--	--	---

		<p><i>Nah ini juga penting ya, karena masing-masing stakeholder kan punya latar belakang dan gaya kerja yang beda-beda. Makanya saya usahakan koordinasinya jangan cuma lewat rapat formal aja. Biasanya kita mulai dari forum-forum resmi dulu kayak Musrenbang, di situ kita samakan persepsi dari atas sampai ke bawah.</i></p> <p><i>Selain itu, kita juga punya grup whatsApp khusus antar kepala desa, pendamping, sama pihak kecamatan. Jadi kalau ada info penting atau perubahan program, bisa langsung disampaikan dan ditanggapi cepat. Intinya sih, saya coba bikin komunikasi itu fleksibel dan dua arah. Gak melulu top-down, tapi juga dengerin masukan dari bawah. Dengan begitu, koordinasinya bisa jalan, dan program-program pembangunan bisa dilaksanakan bareng-bareng tanpa saling salah paham</i></p> <p>3. Bagaimana Anda memotivasi stakeholder untuk terlibat aktif dalam program-program yang mendukung peningkatan IDM?</p> <p><i>Ya, sebenarnya kunci utamanya itu komunikasi yang baik, Mas. Saya nggak pengen kerja bareng ini cuma formalitas, jadi saya usahakan bangun hubungan yang akrab dulu. Saya ajak mereka ngobrol, saya dengarkan pendapat mereka, dan yang paling penting, saya kasih gambaran bahwa apa yang mereka kerjakan itu punya dampak besar buat desa dan masyarakat.</i></p> <p><i>Kadang saya bilang gini, Pak Kades, Mas Pendamping, kalau kita serius kerja sama, kita bisa bikin perubahan nyata di desa, nggak</i></p>
--	--	--

		<p><i>cuma buat hari ini, tapi buat jangka panjang. Nah, itu biasanya bikin mereka lebih semangat. Terus, saya juga suka kasih apresiasi, walau kecil, kayak sekedar pujian atau disampaikan ke publik saat rapat bahwa mereka punya kontribusi. Hal-hal kayak gitu kan bikin orang merasa dihargai, dan itu penting biar semangatnya tetap hidup. Gak harus yang muluk-muluk.</i></p> <p>4. Jika terjadi hambatan komunikasi atau perbedaan pandangan antar-stakeholder, bagaimana pendekatan Anda dalam menyelesaikan masalah tersebut?</p> <p><i>Namanya juga kerja bareng mas, pasti ada aja beda pendapat. Tapi menurut saya, kuncinya itu jangan langsung tegang dulu. Biasanya saya ajak duduk bareng, ngobrol santai dulu, jangan langsung formal rapat. Kadang lewat ngopi bareng pun bisa, asal suasananya cair.</i></p> <p><i>Saya coba jadi penengah yang netral mas, dengar dari semua pihak, terus cari titik temu. Saya juga sering bilang ke mereka, Kita ini satu tim, tujuannya sama, pengen desanya maju. Jadi pelan-pelan kita samakan persepsi. Kalau ada salah paham, kita luruskan bareng-bareng. Intinya, jangan sampai beda pandangan itu malah bikin kerjaan berhenti. Kita cari solusi, bukan saling menyalahkan.</i></p>
3	Prioritas dalam peningkatan IDM	<p>1. Dalam upaya meningkatkan Indeks Desa Membangun, aspek sosial, ekonomi, atau lingkungan mana yang Anda anggap paling penting untuk diprioritaskan di Kecamatan Sragi, dan mengapa?</p>

			<p><i>Kalau menurut saya ya Mas, semuanya penting sih sebenarnya. Tapi kalau disuruh milih ya yang paling mendesak di Sragi, saya bilang aspek lingkungan. Soalnya beberapa desa di sini itu rutin banget kena banjir. Jadi sebelum kita ngomongin peningkatan ekonomi atau kegiatan sosial, ya lingkungannya harus aman dulu. Gimana mau produktif kalau sawah tergenang terus, atau jalan rusak gara-gara banjir?</i></p> <p><i>Makanya saya tekankan ke teman-teman desa dan stakeholder lain, yuk kita bareng-bareng urusin soal ini dulu. Misal lewat normalisasi saluran, penanganan sampah, dan edukasi soal pengelolaan lingkungan. Kalau lingkungan udah kondusif, baru deh dimensi yang lain bisa kita gas bareng-bareng. Kira-kira seperti itu mas.</i></p> <p>2. Bagaimana Anda menentukan program-program pembangunan yang harus diprioritaskan untuk mendongkrak IDM di desa-desa Kecamatan Sragi?</p> <p><i>Biasanya kita lihat dari data dulu Mas. Kan tiap tahun kita dapat laporan IDM yang nunjukin desa mana yang masih tertinggal atau berkembagn, di aspek sosial, ekonomi, atau lingkungan. Dan kalau gak salah ditahun 2024 baru satu desa yang naik jadi majau Nah, dari situ kita petakan, mana yang harus kita bantu duluan. Misalnya, kalau ada desa yang angka stunting-nya tinggi, berarti kita arahkan ke program ke bidang kesehatan atau gizi. Kalau akses jalan buruk, ya kita dorong ke infrastruktur.</i></p>
--	--	--	---

		<p><i>Terus, kita juga diskusi bareng kepala desa sama pendamping. Mereka kan yang paling ngerti kondisi riil di lapangan. Jadi kita enggak cuma pakai angka, tapi juga pakai masukan langsung dari bawah. Intinya sih, kita ambil langkah yang paling dibutuhkan dan berdampak besar buat masyarakat.</i></p> <p><i>Jadi kedepannya desa harus bisa naik status idm desanya, pelan tapi pasti mas.</i></p> <p>3. Bagaimana pendekatan Anda terhadap desa-desa yang memiliki tantangan lebih besar dalam meningkatkan IDM? Apakah ada kebijakan atau program khusus untuk desa dengan kendala tertentu?</p> <p><i>Kalau soal desa-desa yang punya tantangan lebih berat dalam ningkatin IDM, kita biasanya nggak pakai pendekatan yang kaku ya, Mas. Kita lihat dulu masalah utamanya apa misalnya ada yang sering banjir, ada yang akses jalannya rusak, atau SDM-nya belum siap. Nah, dari situ baru kita bantu carikan solusi yang cocok.</i></p> <p><i>Biasanya kita juga sering kasih perhatian lebih ke desa-desa itu, baik dari segi pendampingan maupun program. Misalnya, kita bantu mereka untuk nyusun prioritas pembangunan yang realistis dan bisa berdampak langsung ke indikator IDM. Kita juga nggak ragu minta support dari kabupaten kalau memang dibutuhkan, supaya mereka nggak merasa jalan sendiri. Intinya sih, kita pengen semua desa itu bisa naik bareng, meskipun start-nya beda-beda.</i></p>
--	--	---

4	Monitoring dan evaluasi peran stakeholder	<p>1. Bagaimana Anda memantau pelaksanaan peran setiap stakeholder dalam program pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan IDM?</p> <p><i>Kalau soal ngawasin pelaksanaan peran masing-masing stakeholder, ya kita jalanin sambil tetap jaga komunikasi aja. Biasanya lewat forum-forum koordinasi, rapat bulanan, terus kita juga sering turun ke lapangan. Jadi nggak cuma nunggu laporan, tapi kita cek langsung gimana progresnya.</i></p> <p><i>Kita pastikan masing-masing pihak ngerti tugasnya dan jalan sesuai porsinya. Kalau ada yang belum maksimal, ya kita bantu cari solusi bareng. Intinya sih, kita nggak nyalahin, tapi ngajak bareng-bareng nyelesain. Karena kan ini kerja tim, bukan kerja satu-dua orang aja.</i></p> <p>2. Apa indikator yang Anda gunakan untuk mengevaluasi kinerja stakeholder dalam pencapaian Indeks Desa Membangun?</p> <p><i>Kalau ngomongin indikator, kita biasanya lihat dari tiga dimensi utama IDM itu sendiri, ya sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi, misalnya dari segi sosial, kita cek apakah layanan pendidikan dan kesehatan makin baik. Dari sisi ekonomi, kita lihat ada nggaknya peningkatan usaha mikro, atau warga yang mulai punya penghasilan tambahan. Nah, lingkungan juga kita perhatikan, terutama desa yang rawan banjir, apakah sudah ada langkah-langkah mitigasi atau belum.</i></p> <p><i>Selain itu, kita lihat juga dari keaktifan mereka di lapangan. Misalnya, kepala desa rajin</i></p>
---	---	---

		<p><i>koordinasi, pendamping desa aktif dampingi warga, ya itu nilai plus. Jadi bukan cuma angka-angka aja, tapi juga semangat dan kerja barengnya itu penting banget buat saya.</i></p> <p>3. Setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja stakeholder, langkah apa yang Anda ambil untuk mengatasi kekurangan atau masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program?</p> <p><i>Kalau sudah dievaluasi ternyata ada kekurangan atau masalah, ya kita nggak langsung menyalahkan siapa-siapa. Biasanya saya ajak ngobrol bareng dulu, ngobrol santai, biar suasananya enak. Dari situ kita bedah bareng, apa sih kendalanya, kenapa bisa begitu, dan apa yang bisa diperbaiki. Jadi pendekatannya lebih ke pembinaan, bukan hukuman.</i></p> <p><i>Terus kita buat semacam rencana tindak lanjut, ya bisa berupa pelatihan tambahan, dan pendampingan yang lebih intens. Yang penting semuanya tetap jalan, semua merasa dilibatkan, dan tujuannya tetap ke peningkatan IDM. Intinya saya harap ada perubahan besar mulai sekarang dalam hal komunikasi, agar IDM di Desa Kecamatan Sragi bisa meingkat, dan tidak berkembang terus.</i></p>
--	--	---

Tabel 4.2.5 Rekapitulasi Instrumen dan Jawaban Informan Sekcam

No	Variable	Informan	Instrumen
II	Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder		

1	Frekuensi komunikasi antar stakeholder	Sekcam	<p>1. Seberapa sering anda mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi dengan stakeholder lainnya, seperti kepala desa, pendamping desa, atau pihak terkait lainnya?</p> <p><i>Kami biasanya adakan rapat koordinasi rutin sebulan sekali, Mas, minimal itu ya. Tapi kalau ada hal yang sifatnya mendesak, bisa saja seminggu sekali atau bahkan dadakan, misalnya pas ada isu yang perlu cepat ditangani bareng-bareng. Intinya, komunikasi itu terus jalan, nggak cuma nunggu jadwal resmi. Kadang juga kita ngobrol santai pas ketemu di acara desa atau pas kunjungan ke lapangan. Jadi, koordinasi nggak selalu harus di ruang rapat, bisa fleksibel asal tujuannya nyambung.</i></p> <p>2. Apakah ada jadwal rutin atau forum tertentu yang disepakati untuk memastikan komunikasi antar-stakeholder berjalan dengan baik?</p> <p><i>Iya, kita biasanya punya jadwal rutin rapat koordinasi tingkat kecamatan tiap bulan, itu udah jadi semacam forum tetap buat ngobrol bareng semua stakeholder baik itu kepala desa, pendamping desa, maupun tim kecamatan biasanya giliran di rumah-rumah kepala desa, semacam pakai acara arisan, tapi disitu banyak informasi yang disampaikan mas. Tapi di luar itu, kadang juga ada forum tematik, misalnya khusus bahas IDM atau progres pembangunan. Jadi, komunikasi jalan terus, nggak cuma nunggu satu forum aja. Lewat grup WhatsApp juga sering tuh, update cepat atau</i></p>
---	--	--------	--

		<p><i>koordinasi lapangan langsung kita sampaikan di situ.</i></p> <p>3. Dalam menghadapi kendala atau permasalahan di lapangan, seberapa cepat komunikasi antar stakeholder dapat dilakukan untuk mencari solusi bersama?</p> <p><i>Kalau soal kendala di lapangan, komunikasi biasanya bisa langsung jalan, Mas. Kita nggak nunggu waktu lama gitu, begitu ada laporan atau informasi, langsung kita respon lewat WA grup atau telepon. Kadang kalau urgen banget, kita langsung kumpul sebentar, diskusi cepat. Jadi fleksibel aja, yang penting masalah bisa cepat dicarikan solusi bareng-bareng. Intinya kita saling jaga komunikasi tetap terbuka biar nggak numpuk masalah dan berlarut-larut.</i></p>
2	Jenis komunikasi yang digunakan	<p>1. Apa jenis komunikasi yang paling sering anda gunakan dalam berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, apakah tatap muka, telepon, atau melalui aplikasi digital seperti whatsapp atau telegram?</p> <p><i>Kalau ditanya soal jenis komunikasi, jujur yang paling sering ya lewat WhatsApp, Mas. Cepat, praktis, dan semua orang sudah pegang HP. Tapi kalau ada hal penting banget atau butuh diskusi lebih dalam, biasanya kita adakan pertemuan langsung. Jadi kombinasi aja, antara digital dan tatap muka, tergantung situasinya. Yang penting info nyampe dan nggak salah paham.</i></p>

		<p>2. Apakah ada tantangan atau kendala yang anda temui terkait dengan jenis komunikasi tertentu dalam koordinasi antar-stakeholder?</p> <p><i>Kalau kendala sih pasti ada ya. Misalnya, kadang ada kepala desa atau perangkat yang nggak langsung respon kalau dikontak lewat WA, mungkin lagi di lapangan atau sinyalnya susah. Terus, nggak semua orang juga nyaman diskusi panjang di chat, jadi kadang informasi kurang nyambung. Makanya, kalau udah mulai 'nggak nyambung', kita biasanya cepat-cepat atur pertemuan langsung biar bisa diselesaikan secara jelas, mungkin seperti itu mas.</i></p>
3	Kualitas komunikasi antar-stakeholder	<p>1. Apakah kualitas komunikasi antar-stakeholder selama ini sudah mendukung upaya peningkatan IDM, terutama dalam menyelaraskan pemahaman tentang indikator IDM di tingkat sosial, ekonomi, dan lingkungan?</p> <p><i>Kalau soal kualitas komunikasi, alhamdulillah selama ini terbilang cukup mendukung ya. Biasanya saya mendapat mandat dari pak camat yang saya teruskan dan komunikasikan dengan Kasi PMD. Memang kadang ada kendala-kendala dilapangan, namanya juga orang banyak mas terkadang sedikit miss komunikasi dan itu wajar ya, jadi kadang perlu disederhanakan lagi penjelasannya biar semua paham, terutama di desa-desa yang SDM-nya terbatas. Tapi secara umum, kita udah punya kesepahaman yang cukup baik kok.</i></p>

			<p>2. Bagaimana komunikasi antar-stakeholder memengaruhi kemampuan desa untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang relevan dengan peningkatan dimensi IDM? Apakah ada hambatan yang mengurangi efektivitasnya?</p> <p><i>Komunikasi itu kunci ya mas dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kalau komunikasi antar-stakeholder lancar, biasanya program di desa juga bisa jalan lebih tepat sasaran. Tapi ya namanya juga kerja bareng-bareng, kadang ada aja hambatannya misalnya beda persepsi, atau informasi yang nyampainya nggak bareng. Jadi saya harap Kasi PMD dan Pendamping Bisa pro aktif mendampingi desa, Jadi intinya, komunikasi yang baik memang sangat berpengaruh ke efektivitas program peningkatan IDM</i></p>
--	--	--	---

Tabel 4.2.6 Rekapitulasi Instrumen dan Jawaban Informan Kasi PMD

No	Variable	Informan	Instrumen
III	Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder		
1	Tingkat kolaborasi antar-stakeholder	Kasi PMD	<p>1. Bagaimana bentuk kolaborasi antara stakeholder, seperti kecamatan, kepala desa, dan pendamping desa, dalam menyusun program yang secara langsung mendukung peningkatan indikator IDM?</p> <p><i>Kolaborasi itu biasanya ya mas dimulai dari musyawarah desa, terus naik ke musrenbang kecamatan. Di situ semua pihak duduk bareng, baik dari pihak kecamatan, kepala desa, pendamping desa, sampai tokoh</i></p>

		<p><i>masyarakat. Kita bareng-bareng lihat data IDM masing-masing desa, lalu diskusikan program apa yang paling cocok buat ningkatin indikator yang masih lemah. Misalnya kalau nilai di dimensi ekonomi masih rendah, ya kita coba dorong program padat karya atau pelatihan usaha. Intinya, semuanya terlibat aktif dari awal, jadi program yang disusun bisa lebih nyambung sama kebutuhan riil di lapangan.</i></p> <p>2. Apakah ada mekanisme atau forum khusus yang digunakan untuk memastikan kolaborasi antar-stakeholder berjalan efektif dalam memonitor dan mengevaluasi pencapaian IDM? Jika ada, bagaimana mekanisme tersebut bekerja?</p> <p><i>Ada, biasanya kita pakai forum koordinasi tingkat kecamatan. Dan ada juga pertemuan rutin paguyuban kepala desa tiap bulan. Itu semacam wadah buat ngecek bareng-bareng progres IDM masing-masing desa. Kita undang kepala desa, pendamping, PLD. Di forum itu, kita lihat data dari desa, terus bahas bareng apa yang sudah jalan dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Jadi nggak cuma sekadar laporan di atas kertas, tapi kita diskusi langsung, cari solusi kalau ada kendala.</i></p> <p><i>Dan pendamping sebagai ujung tombak yang tau kondisi dilapangan kita dorong untuk lebih pro aktif dalam meningkatkan IDM di masing-masing Desa binaan mereka.</i></p> <p>3. Sejauh mana Anda merasa bahwa kolaborasi antar-stakeholder saat ini telah</p>
--	--	--

		<p>mendukung tercapainya target peningkatan IDM? Apa saja yang perlu ditingkatkan agar kolaborasi tersebut lebih optimal?</p> <p><i>Kalau dibilang sudah mendukung, ya cukup terasa ya, kolaborasinya udah lumayan sih. Tapi ya namanya kerja bareng, pasti ada aja yang bisa ditingkatkan. Misalnya, kadang koordinasi teknis antar desa atau antar pendamping masih kurang cepat, terus soal pelaporan juga kadang belum sinkron waktunya. Nah, ke depan kita pengen ada sistem yang lebih rapi dan terjadwal, biar semua geraknya seirama. Intinya sih, tinggal diperkuat lagi komitmen dan keterbukaannya.</i></p> <p><i>Dan saya percaya pendampig juga sudah maksimal dalam mendukung peningkatan IDM di desa. Tinggal nanti lebih ditigkatkan kembali komunikasinya.</i></p>
2	Resolusi konflik dan penyelesaian masalah	<p>1. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara stakeholder, seperti kecamatan, kepala desa, atau pendamping desa, dalam menentukan prioritas program peningkatan IDM, bagaimana konflik tersebut biasanya diselesaikan?</p> <p><i>Ya namanya kerja bareng, beda pendapat itu hal yang biasa, malah bagus buat nyari solusi terbaik. Biasanya kalau ada beda pandangan soal prioritas program, kita duduk bareng dulu, rembukan. Saya biasanya fasilitasi diskusi itu, biar masing-masing pihak bisa jelasin sudut pandangnya. Kita cari titik temu dengan ngelihat data IDM yang ada dan kondisi di lapangan. Kalau udah ketemu benang merahnya,</i></p>

		<p><i>tinggal dibikin kesepakatan bareng. Intinya sih saling terbuka, dan fokusnya tetep sama: gimana caranya desa bisa berkembang bareng-bareng.</i></p> <p><i>Tetap saya berkoordinasi dengan kepala desa terutama pedamping ya, yang intens berkomunikasi dengan kami sejauh mana progres IDM di desa-desa.</i></p> <p>2. Apakah terdapat prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan IDM? Jika ada, bagaimana penerapannya?</p> <p><i>Iya, kita di sini udah punya semacam pola atau alur kerja kalau ada masalah dalam pelaksanaan program IDM. Biasanya sih diawali dari identifikasi masalah dulu, biasanya dilaporkan dari desa atau hasil monitoring. Setelah itu, kita adakan pertemuan kecil atau koordinasi lintas pihak, entah itu lewat forum kecamatan atau cukup lewat grup WhatsApp kalau masalahnya nggak terlalu besar. Kalau butuh, kita juga bisa turun langsung ke lapangan bareng pendamping buat lihat langsung situasinya. Intinya, setiap langkah itu kita upayakan bareng-bareng, nggak ada yang jalan sendiri. Semua kita libatkan biar penyelesaiannya bisa diterima semua pihak. Dan pastinya harus sesuai regulasi dari pemerintah.</i></p> <p>3. Bisakah Anda memberikan contoh kasus konflik yang pernah terjadi antara</p>
--	--	---

		<p>stakeholder terkait program IDM, dan bagaimana proses resolusi konflik tersebut memengaruhi hasil pembangunan desa?</p> <p><i>Oh iya, pernah ada kasus waktu salah satu desa dimana jumlah warga desa nya menurun drastis dalam satu tahun sekitar 2000 warga, dan menurut pendamping tidak masuk akal, kecuali ada pagebluk di desa itu, tapi pastinya aka jadi berita heboh dan ternyata tidak ada kejadian luar biasa.</i></p> <p><i>Setelah kami kroscek ternyata ada kesalahan dalam pendataan yang dilakukan oleh salah satu perangkat, dan itu semua bisa diatasi dengan pembaharuan data yang valid.</i></p> <p><i>Ada juga desa yang mau membangun gedung serba guna tapi di desa itu masih banyak terdapat anak yang stunting, jadi menurut pendamping tetap harus memprioritaskan kesehatan warga karena itu kebutuhan dasar dan itu membuat status desanya masih rendah di aspek sosial. Nah, waktu itu sempat terjadi tarik ulur antara pihak desa dan pendamping. Akhirnya kita fasilitasi pertemuan di kecamatan, kita duduk bareng bahas datanya, indikator IDM-nya, dan dengarkan pendapat semua pihak. Setelah diskusi beberapa kali, akhirnya disepakati pembangunan gedung serbaguna tetap dilakukan tapi bertahap dianggarkan tiap tahun. Tapi penganggarann untuk kesehatan jadi prioritas.</i></p> <p><i>Dari situ kita belajar bahwa kalau komunikasi dibuka dan data dijadikan acuan bersama, konflik bisa diselesaikan dan hasil</i></p>
--	--	---

			<i>pembangunan pun jadi lebih seimbang dan tepat sasaran.</i>
--	--	--	---

Tabel 4.2.7 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Ketua Paguyuban Kepala Desa

No	Variable	Informan	Instrumen
IV	Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM		
1	Prioritas dalam peningkatan IDM	Ketua Paguyuban Kepala Desa	<p>1. Dalam upaya meningkatkan Indeks Desa Membangun, aspek sosial, ekonomi, atau lingkungan mana yang Anda anggap paling penting untuk diprioritaskan di Kecamatan Sragi, dan mengapa?</p> <p><i>Kalau menurut saya pribadi, aspek yang paling penting untuk diprioritaskan itu ya lingkungan, Mas. Soalnya kita di Kecamatan Sragi ini kan beberapa desa langganan banjir, terutama kalau musim hujan tiba. Nah, kalau lingkungannya nggak kita benahi dulu, misalnya dengan normalisasi saluran air atau edukasi soal kebersihan dan tata ruang, dampaknya bakal ke mana-mana ekonomi bisa lumpuh, aktivitas sosial juga terganggu. Jadi menurut saya, lingkungan harus jadi dasar utama dulu, biar pembangunan di aspek lain juga bisa jalan lebih maksimal.</i></p> <p>2. Bagaimana Anda menentukan program-program pembangunan yang harus diprioritaskan untuk</p>

		<p>mendongkrak IDM di desa-desa Kecamatan Sragi?</p> <p><i>Biasanya kita mulai dari data dulu, Mas. Kita lihat nilai IDM masing-masing desa, terus kita petakan, mana yang masih rendah di dimensi sosial, ekonomi, atau lingkungannya. Nah, dari situ baru kita rembug bareng sama kepala desa lain, pendamping desa, dan pihak kecamatan. Kita duduk bareng, diskusi program apa yang paling mendesak. Misalnya, kalau ada desa yang belum punya akses air bersih atau jalannya rusak parah, ya itu yang kita dorong dulu. Jadi nggak asal bangun, tapi memang sesuai kebutuhan dan berdampak langsung ke masyarakat. Juga kita liat regulasi dari pusat tentang prioritas penggunaan dana desa, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing desa.</i></p> <p>3. Bagaimana pendekatan Anda terhadap desa-desa yang memiliki tantangan lebih besar dalam meningkatkan IDM? Apakah ada kebijakan atau program khusus untuk desa dengan kendala tertentu?</p> <p><i>Kalau ada desa yang tantangannya lebih berat, ya kita nggak bisa biarin jalan sendiri. Biasanya kita ajak rembukan bareng, terus kita usulkan supaya desa itu dapet perhatian lebih, baik dari kecamatan, kabupaten, atau bahkan lewat program bantuan.</i></p>
--	--	---

			<p><i>Kadang juga kita sesama kepala desa saling bantu, sharing pengalaman atau bahkan tenaga. Misalnya ada desa yang langganan banjir atau infrastrukturnya tertinggal, kita bantu dorong supaya jadi prioritas di musrenbang. Intinya sih, kita nggak jalan sendiri-sendiri, tapi saling dukung supaya semua desa bisa naik bareng.</i></p> <p><i>Dan saya sering mengajak teman-teman kepala desa untuk mencari sumber anggaran lain, supaya permasalahan di desa cepat selesai, dan indeks desa bisa naik tidak hanya berkembang saja tapi naik menjadi maju.</i></p>
V	Kendala dalam sinergi dan solusi yang diterapkan		
1	Hambatan pemahaman terhadap IDM	Ketua Paguyuban Kepala Desa	<p>1. Sejauh mana pemahaman Anda terhadap tiga dimensi dalam Indeks Desa Membangun (sosial, ekonomi, dan lingkungan)?</p> <p><i>Ya kalau soal tiga dimensi IDM itu, kita udah cukup paham. Dimensi sosial itu kayak soal pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan masyarakat. Ekonomi lebih ke kegiatan usaha masyarakat, BUMDes, sama akses ke lapangan kerja. Nah kalau lingkungan, itu yang kadang agak menantang, apalagi kalau ada desa yang rawan banjir atau belum tertata soal sanitasi. Tapi kita terus belajar dan diskusi bareng, biar pemahaman kita makin lengkap dan</i></p>

		<p><i>bisa diterapkan langsung di desa. Dan ada pendamping desa yang selalu mendampingi desa kami agar sesuai regulasi sehingga bisa meningkat indeks desanya.</i></p> <p>2. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait indikator dan pengukuran IDM? Jika ya, bagaimana dampaknya terhadap peran Anda?</p> <p><i>Iya pernah mas, saya pernah ikut pelatihan dan sosialisasi soal IDM, biasanya dari dinas atau undangan dari kecamatan. Dampaknya lumayan besar ya, jadi lebih ngerti indikatornya itu apa aja dan gimana ngukurinya. Kita jadi bisa lebih fokus waktu nyusun program di desa, nggak asal jalan aja, tapi nyambung sama target IDM. Terus, kita juga bisa bantu kasih pemahaman ke kades-kades lain biar searah dan nggak ada yang ketinggalan. Dan jagan lupa pendamping juha sering memberika edukasi tentang IDM ini.</i></p> <p>3. Apa kendala utama yang Anda alami dalam memahami indikator IDM dan cara penerapannya di desa?</p> <p><i>Kalau boleh jujur, kendalanya itu kadang indikator IDM itu banyak dan detail, ya. Terus, bahasanya kadang teknis banget, jadi butuh waktu buat benar-benar paham. Apalagi kalau datanya kurang lengkap atau enggak</i></p>
--	--	---

		<p><i>update, itu bisa bikin bingung juga. Kadang juga kurang pendampingan yang intens dari pihak kabupaten, paling kecamatan dari PMD dan pendamping yang tiap tahun mendampingi, jadi kita harus belajar sendiri pelan-pelan bareng teman-teman kades lain. Tapi sekarang sudah lumayan ya mas, pak camat juga sudah sering berkomunikasi untuk meningkatkan IDM di tiap desa.</i></p> <p>4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kecamatan atau pihak lain untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang IDM? Apakah menurut Anda upaya tersebut sudah efektif?</p> <p><i>Ya, dari pihak kecamatan sebenarnya sudah ada upaya sih mas, misalnya ngadain rapat koordinasi atau undangan sosialisasi dari dinas kabupaten. Kita juga pernah dikasih materi tentang IDM, meskipun penyampaiannya kadang singkat dan belum terlalu mendalam. Menurut saya sih udah ada niat baik ya, tapi mungkin ke depannya bisa lebih sering dan lebih praktis, jadi kita para kepala desa bisa lebih paham dan langsung tahu harus mulai dari mana di desa masing-masing. Tapi kami bersyukur masih ada pendamping yang selalu membantu tentang IDM ini.</i></p>
2	Ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab	<p>1. Apakah peran dan tanggung jawab Anda dalam upaya peningkatan IDM sudah jelas? Bagaimana peran tersebut</p>

		<p>diintegrasikan dengan peran stakeholder lainnya?</p> <p><i>Kalau soal peran sih secara umum sudah cukup jelas ya, sebagai kepala desa kita yang paling dekat sama masyarakat, jadi tanggung jawab kita besar dalam pelaksanaan program-program yang mendukung IDM. Cuma kadang memang masih perlu penyelarasan sama stakeholder lain, kayak pendamping desa atau pihak kecamatan, biar nggak tumpang tindih.</i></p> <p><i>Biasanya kita koordinasi lewat forum rapat atau komunikasi langsung, dan dari situ peran masing-masing mulai bisa saling ngisi dan nggak jalan sendiri-sendiri. Dan kita juga ada pertemuan sebulan sekali degan stakeholder lai, disanalah biasanya kita adakan pembahasan lebih lanjut.</i></p> <p>2. Apakah Anda pernah mengalami tumpang tindih peran atau merasa ada kekosongan tanggung jawab yang seharusnya ditangani oleh stakeholder lain? Jika ya, bagaimana hal itu memengaruhi kinerja tim?</p> <p><i>Pernah sih, kadang-kadang ada juga momen di mana peran kita kayak tumpang tindih sama pendamping desa atau perangkat kecamatan. Misalnya pas ngurus data atau pelaporan, kita bingung siapa yang harus ambil alih duluan. Nah, kalau</i></p>
--	--	---

			<p><i>udah begitu, kerjaan bisa jadi lambat karena saling tunggu. Tapi biasanya kita langsung rembukan bareng, ngobrol santai aja, biar jelas siapa ngapain. Intinya komunikasi yang jalan sih yang bikin semuanya tetap lancar.</i></p> <p>3. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk menghindari ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab antar-stakeholder, terutama dalam konteks pengelolaan program IDM?</p> <p><i>Menurut saya sih, cara terbaik ya komunikasi yang rutin dan terbuka. Jadi, sebelum program jalan, semua pihak duduk bareng dulu, disepakati siapa ngurus apa, biar nggak saling tumpang tindih atau malah ada yang nggak kepegang. Terus juga harus ada kejelasan peran dari awal, jangan sampai baru bingung di tengah jalan. Kalau udah dibagi jelas, tinggal saling dukung aja. Intinya kerja tim itu kuncinya. Monitoring dari kecamatan dan pedampinng juga sangat peting.</i></p>
VI	Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan		
1	Mitigasi Risiko Bencana	Ketua Paguyuban Kepala Desa	<p>1. Bagaimana koordinasi dan sinergi antar-stakeholder telah membantu mempersiapkan desa dalam menghadapi risiko bencana, seperti banjir atau kekeringan?</p> <p><i>Koordinasi antar-stakeholder itu sangat membantu ya, apalagi buat</i></p>

		<p><i>desa-desa yang rawan kayak banjir di musim hujan atau kekeringan di musim kemarau. Biasanya kita koordinasi sama BPBD, kecamatan, sama pendamping juga, biar tahu langkah daruratnya gimana. Terus, di tingkat desa juga udah mulai dibentuk tim siaga bencana, dan itu hasil sinergi bareng-bareng. Jadi nggak kerja sendiri-sendiri.</i></p> <p>2. Program atau langkah mitigasi apa yang telah dilakukan melalui sinergi stakeholder, dan bagaimana dampaknya terhadap keamanan serta kesejahteraan masyarakat desa?</p> <p><i>Kalau soal mitigasi, kita udah lumayan sering kerja bareng antar-stakeholder, contohnya bikin program normalisasi sungai kecil di desa yang rawan banjir. Itu bareng sama pihak kecamatan, dinas teknis, dan pendamping desa. Selain itu, kita juga punya kegiatan bersih-bersih lingkungan rutin dan pelatihan penanggulangan bencana ringan buat warga. Dampaknya cukup kerasa sih, warga jadi lebih siap, terus kerusakan kalau ada banjir bisa diminimalkan. Yang jelas, rasa aman dan kesadaran masyarakat jadi meningkat. Jadi bukan cuma soal fisik, tapi juga mental siap hadapi risiko. Sekarang lebih sering kita komunikasikan bersama, agar nilai indeks desa naik dan semua desa bisa maju bahkan bisa mandiri kalau bisa.</i></p>
--	--	---

Tabel 4.2.8 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten

No	Variable	Informan	Instrumen
VII	Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan		
1	Peningkatan Kepercayaan Antar-Stakeholder	Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten	<p>1. Bagaimana Anda menilai tingkat kepercayaan antar-stakeholder, seperti kecamatan, kepala desa, dan pendamping desa, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan IDM?</p> <p><i>Kalau soal kepercayaan antar-stakeholder, saya melihatnya udah lumayan baik ya. Antara kecamatan, kepala desa, dan pendamping desa itu udah mulai saling ngerti peran masing-masing. Mungkin nggak selalu mulus dan lancar ya, kadang ada miskomunikasi kecil, tapi secara umum udah saling percaya dalam merencanakan dan ngejalanin program. Kuncinya sih di komunikasi yang terbuka dan nggak saling curiga. Kalau itu bisa dijaga, biasanya kepercayaan juga makin kuat dari waktu ke waktu.</i></p> <p>2. Apakah ada pengalaman atau strategi tertentu yang membantu membangun dan meningkatkan kepercayaan antar-stakeholder dalam upaya meningkatkan IDM?</p> <p><i>Iya, ada beberapa pengalaman yang menurut saya cukup efektif buat</i></p>

		<p><i>bangun kepercayaan antar-stakeholder. Salah satunya ya konsistensi dalam komunikasi dan keterlibatan aktif dari awal perencanaan. Jadi, sejak awal kami selalu coba duduk bareng—baik dari pihak kecamatan, kepala desa, maupun pendamping desa, buat menyamakan pemahaman dan tujuan. Terus, kita juga usahakan semua pihak dilibatkan dalam setiap proses, nggak ada yang merasa cuma jadi pelengkap. Kadang kita juga fasilitasi pertemuan informal, yang suasananya lebih santai, supaya komunikasi bisa lebih terbuka dan nggak kaku. Dari situ kepercayaan pelan-pelan terbentuk karena masing-masing merasa didengar dan dianggap penting.</i></p>
2	Peningkatan Kapasitas SDM Stakeholder	<p>1. Apa saja kebutuhan pengembangan kapasitas yang menurut Anda masih perlu dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas kerja dalam sinergi antar-stakeholder?</p> <p><i>Kalau soal kebutuhan pengembangan kapasitas, menurut saya masih ada beberapa yang perlu diperkuat, terutama soal pemahaman teknis terkait indikator IDM dan cara menganalisis data di lapangan. Banyak pendamping itu sebenarnya sudah punya semangat, tapi kadang kurang dukungan dalam bentuk pelatihan yang berkelanjutan. Terus, kemampuan komunikasi juga penting banget, gimana cara menyampaikan</i></p>

		<p><i>ide atau menyatukan pandangan dengan kepala desa dan perangkat kecamatan biar nggak salah paham. Jadi bukan cuma soal teknis, tapi juga soft skill-nya. Nah, idealnya sih ada pelatihan rutin atau pembekalan yang lebih terstruktur, bukan cuma sekali dua kali aja.</i></p> <p>2. Sejauh mana pelatihan atau pendampingan yang diberikan telah meningkatkan kapasitas Anda atau pihak lain dalam menjalankan peran untuk mendukung peningkatan IDM?</p> <p><i>Kalau dibilang sudah ada peningkatan sih iya, pelatihan dan pendampingan itu cukup membantu, terutama yang sifatnya teknis kayak penginputan data IDM atau penyusunan RKPDes berbasis IDM. Tapi ya memang masih belum merata, kadang ada pendamping yang belum sempat ikut karena waktu atau jarak. Tapi yang udah ikut, itu lumayan nambah wawasan dan lebih percaya diri waktu mendampingi desa. Cuma memang ke depan perlu lebih rutin dan merata pelatihannya, supaya semua bisa jalan bareng dan nggak timpang.</i></p>
3	Pertumbuhan Ekonomi Lokal	<p>1. Bagaimana sinergi antara stakeholder kecamatan, kepala desa, dan pendamping desa telah berkontribusi pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa-desa Anda?</p>

		<p><i>di sinilah peran kecamatan juga terasa, karena mereka jadi jembatan komunikasi antar desa dan bisa bantu mengarahkan agar program UMKM ini saling dukung antar wilayah. Yang paling menarik, sekarang banyak BUMDes mulai dilibatkan untuk menampung dan memasarkan produk UMKM warga. Misalnya, BUMDes bisa buka unit usaha yang fokus ke pemasaran produk lokal, atau bahkan bantu pengemasan dan branding. Jadi nggak cuma jualan seadanya.</i></p> <p><i>Dari kita juga kita dorong agar sinergi ini terus jalan, karena dengan kerjasama yang baik, antara kepala desa, pendamping, kecamatan, dan BUMDes. UMKM lokal bisa lebih maju dan berdaya saing."</i></p> <p>2. Program atau inisiatif apa yang telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan bagaimana kontribusi dari setiap stakeholder dalam pelaksanaannya?</p> <p><i>Kalau bicara program yang berhasil ninkatin pendapatan masyarakat desa, salah satunya itu program pemberdayaan ekonomi lewat pengembangan BUMDes dan UMKM. Jadi misalnya, ada desa yang punya potensi kerajinan, hasil pertanian, atau makanan olahan, itu kita bantu dorong supaya bisa jadi usaha yang menghasilkan. Pendamping desa perannya ngawal dari bawah: identifikasi potensi, latih warga, sampai bantu nyusun rencana usaha.</i></p> <p><i>Kepala desa biasanya yang support kebijakan dan anggaran, misalnya</i></p>
--	--	---

		<p>lewat Dana Desa untuk penguatan modal awal atau pelatihan warga. Dari pihak kecamatan, mereka bantu koordinasi lintas desa dan pastikan program itu inline sama target kecamatan. Nah, dari kabupaten lewat Dinas PMD, kita bantu fasilitasi pelatihan skala lebih besar, buka akses kemitraan, dan kalau memungkinkan, kita bantu promosi produk ke tingkat kabupaten atau luar daerah.</p> <p>Jadi semua stakeholder punya peran. Dan ketika mereka jalan bareng, hasilnya bisa kelihatan, pendapatan warga naik, usaha desa jalan, dan masyarakat lebih mandiri.</p>
4	Kualitas Layanan Sosial	<p>1. Bagaimana sinergi antar-stakeholder telah membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial?</p> <p>Jujur ya mas, sinergi antar-stakeholder itu kunci banget buat ningkatin akses layanan dasar di desa. Jadi misalnya soal pendidikan dan kesehatan, kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Pemerintah desa dan Pendamping Desa itu kan paling dekat sama masyarakat, mereka biasanya yang identifikasi masalah, entah itu anak putus sekolah, posyandu yang nggak aktif, atau jalan akses yang rusak.</p> <p>Nah, dari situ kita koordinasiin sama kepala desa, kadang juga langsung ke</p>

		<p><i>kecamatan. Kepala desa biasanya responsif, langsung masukin ke musdes dan jadiin program prioritas. Camat bantu menjembatani biar lintas sektor nyambung, misalnya ngajak dinas pendidikan atau puskesmas buat turun tangan.</i></p> <p><i>Buat infrastruktur sosial, seperti jalan lingkungan, jembatan kecil, atau balai warga, kita juga libatkan semua pihak buat nyusun rencana yang realistis. Dana desa jadi salah satu sumber utama, tapi kadang kalau berat, kita dorong kolaborasi lintas desa atau minta dukungan kabupaten.</i></p> <p><i>Intinya sih, kalau semua stakeholder punya persepsi yang sama dan komunikasinya lancar, layanan dasar itu bisa kita tingkatin bareng-bareng, nggak nunggu lama. Dan hasilnya sudah kelihatan kok di beberapa desa, akses ke sekolah jadi lebih gampang, fasilitas kesehatan lebih aktif, dan warga juga makin percaya sama pemerintah desa</i></p> <p>2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam memastikan layanan sosial yang berkualitas, dan bagaimana peran masing-masing stakeholder dalam mengatasinya?</p> <p><i>Tantangannya lumayan banyak ya, apalagi kalau ngomongin soal layanan sosial yang berkualitas. Kadang bukan karena nggak ada niat, tapi lebih ke soal keterbatasan, baik dari segi SDM, anggaran, maupun infrastruktur. Misalnya, ada desa yang posyandunya aktif, tapi tenaga kesehatannya nggak rutin datang.</i></p>
--	--	---

		<p><i>Atau fasilitasnya ada, tapi kurang dimanfaatkan karena masyarakat belum sadar pentingnya layanan itu.</i></p> <p><i>Nah, di situ peran stakeholder mulai kelihatan. Pendamping desa biasanya yang jadi 'mata dan telinga', ngumpulin informasi langsung dari lapangan. Kepala desa dan perangkatnya, mereka penting banget dalam ambil keputusan dan alokasi dana desa buat memperkuat layanan sosial. Camat atau pihak kecamatan bantu mendorong supaya lintas sektor, kayak puskesmas, dinas sosial, atau pendidikan, bisa lebih peduli dan cepat tanggap.</i></p> <p><i>Intinya, tantangan itu pasti ada, tapi kalau komunikasinya lancar dan semua jalan bareng, insyaallah bisa teratasi satu per satu.</i></p>
--	--	--

Tabel 4.2.9 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Pendamping Desa

No	Variable	Informan	Instrumen
VIII	Kendala dalam sinergi dan solusi yang diterapkan		
1	Kesenjangan komunikasi antar-stakeholder	Pendamping Desa	<p>1. Seberapa sering Anda berkomunikasi dengan stakeholder lain (kecamatan, kepala desa, pendamping desa, atau tenaga ahli) dalam membahas program peningkatan IDM?</p> <p><i>Kalau soal komunikasi ya hampir tiap hari. Namanya juga kita ujung tombak di lapangan, kita memang jadi penghubung antara semua</i></p>

		<p><i>stakeholder, baik itu kepala desa, kecamatan, sampai tenaga ahli kabupaten. Kadang lewat rapat resmi, kadang juga lewat WA group, atau langsung ketemu pas turun ke desa.</i></p> <p><i>Misalnya pas nyusun RKPDes atau pas ada pendataan IDM, kita rutin koordinasi biar semua satu arah dan nggak tumpang tindih. Jadi ya, komunikasi itu udah kayak kebutuhan harian buat kami. Nggak harus formal terus, yang penting informasinya sampai dan programnya bisa jalan bareng-bareng.</i></p> <p>2. Apa saja kendala yang Anda alami dalam proses komunikasi dengan stakeholder lain, seperti perbedaan pemahaman atau kurangnya kejelasan informasi?</p> <p><i>Kalau bicara kendala, pasti ada ya. Kadang yang paling terasa tuh soal perbedaan pemahaman, misalnya tentang indikator IDM atau tahapan program. Kita udah jelasin satu hal, tapi persepsi dari stakeholder lain bisa beda. Itu bikin kita harus ulang-ulang penjelasan, bahkan kadang perlu pendekatan yang lebih personal biar nyambung.</i></p> <p><i>Terus ada juga soal kejelasan informasi. Kadang instruksi dari atas belum jelas tapi kita di lapangan dituntut langsung bergerak. Nah, itu bikin posisi kita serba nanggung. Akhirnya harus cari celah, koordinasi</i></p>
--	--	--

		<p><i>ke semua pihak biar informasinya sinkron.</i></p> <p><i>Tapi ya namanya kerja bareng banyak pihak, itu wajar sih. Yang penting kita tetap komunikasi terus, dan sabar jelasin pelan-pelan sampai ketemu titik sepakat.</i></p> <p>3. Menurut Anda, apakah mekanisme komunikasi yang saat ini digunakan, seperti rapat koordinasi atau penggunaan teknologi, sudah memadai? Jika tidak, apa yang perlu ditingkatkan?</p> <p><i>Secara umum sih, mekanisme komunikasi yang ada sekarang kayak rapat koordinasi rutin dan grup WhatsApp udah cukup membantu ya buat saling update dan koordinasi. Tapi jujur aja, terkadang masih ada yang belum maksimal.</i></p> <p><i>Misalnya, rapatnya udah dijadwalkan, tapi nggak semua stakeholder bisa hadir. Atau informasi penting yang dibagikan lewat grup WA tenggelam sama chat lain, jadi ada yang kelewat. Nah, itu kadang bikin miskomunikasi.</i></p> <p><i>Mudah-mudahan kedepan bisa diperbaiki lagi biar lebih optimal.</i></p>
2	Perbedaan Kepentingan dan Prioritas	<p>1. Bagaimana Anda melihat perbedaan kepentingan dan prioritas antara stakeholder, seperti kecamatan, kepala desa, dan pendamping desa, dalam program peningkatan IDM?</p> <p><i>Kalau bicara perbedaan kepentingan dan prioritas, ya pasti ada ya... itu hal</i></p>

		<p>yang wajart. Kecamatan biasanya fokus pada target capaian secara administratif dan capaian wilayah, kepala desa lebih condong ke kebutuhan riil warganya, sementara kami para pendamping desa, lebih fokus ke proses dan pemberdayaan biar program itu benar-benar menyentuh masyarakat dan sesuai prosedur.</p> <p>Tapi ya itu tadi, karena perannya beda-beda, kadang ada tarik ulur soal prioritas. Misalnya, kecamatan ingin percepatan data IDM, tapi di desa sendiri masih terkendala SDM atau infrastruktur, jadi butuh pendekatan yang lebih sabar. Nah, di situlah kami biasanya masuk sebagai penengah, bantu menjembatani komunikasi dan menyamakan persepsi.</p> <p>2. Apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana perbedaan prioritas antara stakeholder menghambat pelaksanaan program pembangunan desa? Bagaimana masalah tersebut diselesaikan?</p> <p>Pernah banget mas. Biasanya itu terjadi waktu nentuin prioritas kegiatan di Musrenbangdes atau saat penyusunan RKPDes. Misalnya, dari kecamatan mendorong program yang mendukung langsung peningkatan IDM, tapi di sisi lain, kepala desa dan BPD lebih memprioritaskan kegiatan fisik yang lebih terlihat hasilnya langsung oleh warga.</p> <p>Nah, di situ kami pendamping sering jadi 'jembatan komunikasi'. Kami</p>
--	--	--

		<p><i>ajak semua pihak duduk bareng, kita tunjukkan data IDM-nya, terus kita bahas mana program yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat tapi juga berdampak ke IDM. Kadang solusinya ya dikombinasikan misalnya, kegiatan fisik tapi tetap nyambung ke dimensi sosial atau ekonomi IDM.</i></p> <p><i>Yang penting kita terbuka dan saling dengar. Biasanya kalau semua pihak merasa pendapatnya dihargai, solusinya bisa ketemu kok, dan program bisa jalan bareng-bareng.</i></p> <p>3. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan untuk menyelaraskan prioritas antar-stakeholder agar program peningkatan IDM berjalan lebih efektif?</p> <p><i>Menurut saya, kuncinya ada di komunikasi yang terbuka sejak awal. Jadi sebelum program disusun, semua stakeholder mulai dari camat, kepala desa, BPD, sampai kami para pendamping harus duduk bareng dan saling dengar dulu. Jangan langsung bawa kepentingan masing-masing, tapi kita mulai dari data IDM dan kondisi real di desa.</i></p> <p><i>Selain itu, penting juga ada penyamaan persepsi soal indikator IDM itu sendiri. Masih banyak yang belum terlalu paham gimana cara kerjanya, padahal itu jadi dasar kita nyusun program. Nah, pertemuan teknis atau forum rutin bisa bantu banget untuk nyatuin visi dan misi. Kalau semua udah ngerti arah yang</i></p>
--	--	--

			<p><i>sama, biasanya prioritas juga bisa disepakati bareng.</i></p> <p><i>Intinya sih, jangan ada yang jalan sendiri-sendiri. Kalau semua stakeholder merasa punya peran dan saling percaya, program IDM bisa lebih gampang dijalankan dengan efektif.</i></p> <p><i>Kita harus lebih bersinergi lagi untuk sama-sama meningkatkan indeks Desa ke depannya.</i></p>
--	--	--	---

Sumber: analisa, 2025

Berdasarkan hasil wawancara informan, maka dapat disimpulkan dari masing-masing informan yaitu:

1. Camat

Camat Sragi memegang peran strategis dalam mengarahkan kebijakan pembangunan desa dengan menekankan pentingnya peningkatan IDM sebagai indikator utama kemajuan wilayah. Ia memprioritaskan pendekatan partisipatif dan kolaboratif melalui sinergi antara kepala desa, pendamping desa, dan perangkat kecamatan. Dalam pelaksanaan program, Camat mendorong penyamaan visi, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memberikan ruang diskusi terbuka untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Menurutnya, dimensi sosial dan ekonomi menjadi fokus utama yang perlu terus diperkuat, terutama dalam pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi masyarakat. Ia juga mengakui adanya tantangan dalam pemahaman teknis di tingkat desa, sehingga perlu penguatan kapasitas secara berkelanjutan.

2. Sekretaris Camat (Sekcam)

Sekcam menegaskan bahwa komunikasi merupakan kunci utama dalam menjaga kelancaran koordinasi antar-stakeholder. Ia berperan dalam menjembatani arahan camat dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Forum koordinasi formal seperti rapat mingguan serta penggunaan platform komunikasi digital seperti grup WhatsApp, menjadi strategi yang digunakan untuk memastikan semua pihak selalu terhubung dan memahami peran masing-masing. Meski komunikasi berjalan cukup baik, ia menyadari bahwa terkadang perbedaan persepsi masih muncul, sehingga dibutuhkan kesabaran, pendekatan personal, dan penjelasan yang berulang untuk menyamakan pemahaman tentang indikator dan target IDM.

3. Kasi PMD

Sebagai pelaksana teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, Kasi PMD menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder dalam menyusun dan menjalankan program yang berdampak langsung pada peningkatan IDM. Ia menyebut bahwa peran pendamping desa sangat penting dalam menjembatani pemahaman indikator teknis di tingkat desa. Kasi PMD menjelaskan bahwa forum Musrenbangdes dan rapat lintas sektor menjadi sarana evaluasi dan sinkronisasi program, serta menjadi tempat menyelesaikan perbedaan pandangan secara terbuka dan musyawarah. Ia juga mengakui bahwa masih diperlukan penguatan pemahaman indikator IDM di tingkat desa agar semua program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan terukur.

4. Ketua Paguyuban Kepala Desa

Ketua paguyuban kepala desa melihat bahwa kepala desa memiliki posisi strategis sebagai pelaksana langsung kebijakan di tingkat desa. Ia menyebut bahwa pemahaman terhadap indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam IDM semakin berkembang, meskipun di awal sempat menjadi tantangan karena sifatnya yang cukup teknis. Ia mengapresiasi adanya pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan oleh kecamatan dan pendamping desa. Dalam menentukan prioritas pembangunan, ia menyarankan untuk tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing desa, sembari mengacu pada indikator IDM. Ia juga menilai pentingnya kolaborasi dalam mitigasi bencana dan penguatan BUMDes untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

5. Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten

Sebagai koordinator yang membawahi pendamping desa dan menjadi perpanjangan tangan dari Dinas PMD Kabupaten, ia menilai bahwa kepercayaan antar-stakeholder adalah modal penting dalam sinergi peningkatan IDM. Ia menyebutkan bahwa pelatihan dan mentoring rutin terhadap pendamping desa telah memberikan dampak positif dalam hal penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas teknis. Ia juga menekankan pentingnya peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa, termasuk dalam pengembangan UMKM yang melibatkan masyarakat secara langsung. Tantangan dalam penyediaan layanan sosial juga menjadi perhatian, dan menurutnya hanya dapat diatasi jika ada kerja sama yang solid antar pihak, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.

6. Pendamping Desa

Sebagai fasilitator dan ujung tombak pelaksanaan di lapangan, pendamping desa memegang peran yang penting dalam menghubungkan berbagai kepentingan stakeholder. Ia mengakui bahwa komunikasi lintas pihak sudah berjalan cukup baik, meskipun kendala seperti perbedaan persepsi, informasi yang belum tersampaikan secara utuh, atau perbedaan prioritas tetap menjadi tantangan. Ia menekankan bahwa pendekatan personal, diskusi santai, dan saling mendengar menjadi cara efektif dalam menyelesaikan perbedaan. Dalam mendukung peningkatan IDM, pendamping desa juga terus mendorong kepala desa untuk memahami indikator dengan lebih baik, serta memastikan agar semua pihak menyadari peran dan tanggung jawabnya. Ia menyarankan agar penyamaan visi dilakukan sejak awal perencanaan agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik saat implementasi.

4.2.2 Reduksi Data

Dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan guna membantu peneliti dalam Menyusun penelitian ini.

A. Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM

Setiap stakeholder, mulai dari camat, kepala desa, hingga pendamping desa, memiliki peran strategis dan saling melengkapi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang mendorong peningkatan IDM di desa.

Tabel 4.2.10 Rekapitulasi Hasil Jawaban Informan Terkait Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM

Variable	Informan	Reduksi Data
Peran strategis dalam peningkatan IDM	Camat	Camat menggunakan pendekatan kebijakan terintegrasi yang mendorong perencanaan berbasis data dan kondisi riil desa. Fokus utama diarahkan pada dimensi sosial dan ekonomi karena dirasa paling berdampak cepat terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan sinergi, camat aktif memfasilitasi pertemuan rutin antar kepala desa dan pendamping, mendorong koordinasi lintas sektor agar program sejalan dengan indikator IDM.
	Ketua Paguyuban Kepala Desa	Ketua Paguyuban menekankan bahwa aspek sosial dan ekonomi adalah yang paling mendesak untuk diprioritaskan. Alasannya, dua aspek ini paling dirasakan langsung oleh masyarakat dan mampu mendorong percepatan peningkatan IDM, misalnya melalui pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal. Pendekatan dilakukan dengan lebih banyak memberikan dukungan komunikasi dan fasilitasi antar kepala desa, serta mendorong desa-desa yang lebih maju untuk berbagi praktik baik dengan desa yang tertinggal. Beberapa kepala desa secara sukarela membantu desa tetangga, terutama dalam penyusunan dokumen atau strategi peningkatan indikator.
Pendekatan dalam mendorong stakeholder	Camat	Camat menjelaskan bahwa pemahaman peran difasilitasi melalui sosialisasi reguler, pendampingan teknis, dan pelibatan aktif dalam musrenbang. Koordinasi dilakukan melalui forum komunikasi mingguan, serta WA group lintas stakeholder. Untuk

		memotivasi, camat menekankan pendekatan kekeluargaan, saling menghargai peran, dan transparansi. Konflik diselesaikan dengan mediasi informal dan mengedepankan musyawarah mufakat.
Prioritas dalam peningkatan IDM	Camat	Prioritas camat tertuju pada aspek sosial dan ekonomi karena lebih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Program dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa, data IDM, dan pertimbangan kebutuhan mendesak. Untuk desa dengan tantangan tinggi, camat menyiapkan pendekatan khusus seperti penguatan pendampingan dan mendorong kolaborasi dengan pihak terkait.
Monitoring dan evaluasi peran stakeholder	Camat	Camat menggunakan laporan rutin dari pendamping dan perangkat desa sebagai alat monitoring. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian indikator IDM dan progres kegiatan desa. Jika ada kekurangan, dilakukan evaluasi lapangan dan rapat tindak lanjut, disertai pembinaan agar program bisa disesuaikan dan lebih tepat sasaran.

B. Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder

Komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder telah dilakukan melalui berbagai forum, baik formal seperti rapat koordinasi, maupun informal seperti grup WhatsApp, meskipun intensitas dan efektivitasnya masih perlu ditingkatkan di beberapa desa.

Tabel 4.2.11 Rekapitulasi Hasil Jawaban Informan Terkait Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder

Variable	Informan	Reduksi Data
----------	----------	--------------

Frekuensi komunikasi antar-stakeholder	Sekcam	<p>Sekcam menyampaikan bahwa koordinasi dilakukan secara rutin, terutama saat menjelang perencanaan dan pelaporan kegiatan. Rapat koordinasi biasanya dilakukan setiap bulan atau saat ada isu strategis yang perlu segera ditangani.</p> <p>Komunikasi bisa dilakukan secara langsung atau melalui grup WhatsApp, dan biasanya respon cukup cepat, apalagi jika menyangkut persoalan mendesak seperti konflik data atau keterlambatan program.</p>
Jenis komunikasi yang digunakan	Sekcam	<p>Sekcam menyebutkan bahwa komunikasi paling sering dilakukan via WhatsApp karena fleksibel dan cepat. Untuk hal yang sifatnya penting dan kompleks, tetap diprioritaskan tatap muka atau rapat resmi.</p> <p>Tantangan utamanya adalah kesibukan masing-masing pihak dan kadang informasi yang tidak ditanggapi cepat, terutama di luar jam kerja. Tapi secara umum, komunikasi masih cukup efektif.</p>
Kualitas komunikasi antar-stakeholder	Sekcam	<p>Sekcam merasa komunikasi antar-stakeholder cukup solid, meskipun kadang ada perbedaan pemahaman soal indikator IDM. Upaya penyamaan persepsi terus dilakukan melalui pendampingan dan diskusi teknis.</p> <p>omunikasi sangat membantu desa untuk menyusun prioritas kegiatan yang sesuai indikator IDM, terutama saat desa belum terlalu paham teknisnya. Hambatan biasanya muncul dari terbatasnya waktu untuk pertemuan rutin.</p>
Tingkat kolaborasi antar-stakeholder	Kasi PMD	<p>Kasi PMD menjelaskan bahwa kolaborasi dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan, musrenbangdes, serta forum konsultasi publik, di mana semua stakeholder memberikan masukan untuk menyusun</p>

		<p>prioritas pembangunan berdasarkan indikator IDM</p> <p>Ada forum Tim Koordinasi Kecamatan yang menjadi tempat pemantauan progres IDM, serta laporan berkala dari pendamping desa yang menjadi dasar evaluasi bersama.</p> <p>Kolaborasi dinilai cukup mendukung, terutama dalam perencanaan. Namun, perlu peningkatan dalam hal tindak lanjut dan konsistensi waktu antar stakeholder, agar tidak hanya aktif saat awal perencanaan saja.</p>
<p>Resolusi konflik dan penyelesaian masalah</p>	<p>Kasi PMD</p>	<p>Perbedaan pendapat biasanya diselesaikan melalui musyawarah mufakat, dengan pendekatan kekeluargaan, dan mempertimbangkan data objektif dari IDM. yakni melalui rapat koordinasi teknis dan konsultasi langsung dengan kecamatan atau Dinas PMD, jika skala permasalahan cukup besar. Langkah ini dianggap cukup efektif untuk mencegah konflik berkepanjangan.</p> <p>Pernah terjadi perbedaan prioritas antara desa dan pendamping terkait program pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan. Konflik diselesaikan dengan mengacu pada data IDM dan RPJMDes, dan hasilnya justru memperkuat sinergi karena akhirnya semua pihak memahami pentingnya dasar data dalam menentukan program.</p>

C. Kendala dalam Sinergi dan Solusi yang Diterapkan

Perbedaan kepentingan, pemahaman indikator IDM yang belum merata, dan tumpang tindih peran menjadi tantangan dalam sinergi, namun diselesaikan

melalui dialog terbuka, fasilitasi pendamping, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Tabel 4.2.12 Rekapitulasi Hasil Jawaban Informan Terkait Kendala dalam Sinergi dan Solusi yang Diterapkan

Variable	Informan	Reduksi Data
Hambatan pemahaman terhadap IDM	Ketua Paguyuban Kepala Dea	<p>Sudah cukup memahami, terutama dari sisi sosial dan ekonomi. Dimensi lingkungan masih perlu pendalaman karena kurang tersentuh dalam program-program desa.</p> <p>Kendala utamanya adalah istilah teknis dan indikator yang berubah-ubah, serta kurangnya pendampingan intensif pasca pelatihan.</p> <p>Kecamatan dan pendamping cukup aktif menyosialisasikan. Tapi menurutnya, perlu pendekatan yang lebih sederhana dan contoh langsung di lapangan agar lebih mudah dipahami oleh kepala desa lainnya.</p>
Ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab	Ketua Paguyuban Kepala Desa	<p>Peran kepala desa dalam peningkatan IDM dirasa belum sepenuhnya jelas bagi semua pihak. Kadang tumpang tindih dengan pendamping atau perangkat kecamatan. Perlu pemetaan peran yang lebih tegas dan tertulis agar tidak saling menunggu.</p>
	Pendamping Desa	<p>Pendamping kadang dituntut mengisi peran teknis yang seharusnya dilakukan perangkat desa. Ini berpengaruh pada fokus kerja pendamping itu sendiri.</p> <p>Perlu kejelasan jobdesk sejak awal tahun, ditandatangani bersama. Pendamping hanya mendampingi, bukan eksekutor penuh. Harus ada pemahaman kolektif.</p>

Kesenjangan komunikasi antar-stakeholder	Pendamping Desa	Komunikasi intens, bisa mingguan bahkan harian terutama via WhatsApp. Namun, komunikasi formal seperti rakor belum rutin di semua desa. Perbedaan persepsi dan kepentingan antar stakeholder kadang membuat miskomunikasi. Contohnya dalam prioritas program dan pemahaman terhadap urgensi data IDM. Perlu forum komunikasi tetap dan peningkatan kapasitas teknologi digital, serta pelatihan komunikasi lintas sektor.
Perbedaan kepentingan dan prioritas	Pedamping Desa	Sering terjadi, misalnya kecamatan mendorong pembangunan fisik, sementara desa fokus pada pemberdayaan. Perlu penyesuaian melalui musyawarah. Perlu menyatukan pemahaman sejak awal melalui pelatihan bersama dan rakor terpadu. Data IDM harus dijadikan acuan utama.
Ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab	Pendamping Desa	pendamping kadang dituntut mengisi peran teknis yang seharusnya dilakukan perangkat desa. Ini berpengaruh pada fokus kerja pendamping itu sendiri. Perlu kejelasan jobdesk sejak awal tahun, ditandatangani bersama. Pendamping hanya mendampingi, bukan eksekutor penuh. Harus ada pemahaman kolektif.

D. Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan

Sinergi yang terbangun telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses layanan sosial, pertumbuhan UMKM desa, dan kesiapsiagaan lingkungan, terutama dalam mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam.

Tabel 4.2.13 Rekapitulasi Jawaban dari Informan Terkait Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan

Variable	Informan	Reduksi Data
Mitigasi Risiko Bencana	Ketua Paguyuban Kepala Desa	Terdapat koordinasi antara BPBD, kecamatan, dan desa untuk memetakan wilayah rawan bencana. Pendamping desa ikut membantu penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Desa. Program seperti normalisasi sungai, pembangunan talud, dan pelatihan siaga bencana telah dilakukan melalui musyawarah lintas sektor. Masyarakat lebih siap, angka kerugian akibat banjir mulai menurun.
Peningkatan Kepercayaan Antar-Stakeholder	Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten	Tingkat kepercayaan meningkat seiring seringnya kolaborasi dan koordinasi. Saling memahami peran memperkuat komitmen antar pihak. Keterbukaan dalam diskusi menjadi kunci. Membiasakan komunikasi terbuka, berbagi dokumen perencanaan, dan melibatkan semua pihak dalam forum musyawarah menjadi strategi utama. Pendekatan personal juga cukup membantu.
Peningkatan Kapasitas SDM Stakeholder	Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten	Masih dibutuhkan pelatihan teknis input data IDM, penguatan perencanaan partisipatif, serta peningkatan pemahaman regulasi. Pelatihan yang dilakukan cukup membantu, terutama bagi pendamping dan perangkat desa. Namun perlu kesinambungan dan sistem monitoring agar hasil pelatihan berdampak langsung di lapangan.

Pertumbuhan Ekonomi Lokal	Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten	Sinergi antar stakeholder mendorong munculnya program BUMDes yang menysasar sektor produktif desa. Dukungan teknis dan permodalan makin terbuka karena komunikasi lintas pihak. Pengembangan BUMDes unit simpan pinjam, pelatihan pengolahan hasil tani, dan promosi UMKM melalui media sosial menjadi langkah nyata. Peran pendamping dalam pendampingan administrasi juga krusial.
Kualitas Layanan Sosial	Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten	Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dicapai lewat integrasi dana desa dengan program sektoral. Contoh: posyandu digital, beasiswa anak desa, dan pengadaan sarana MCK. Tantangannya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Namun peran stakeholder saling melengkapi: camat sebagai pengarah, kepala desa pengambil kebijakan lokal, pendamping sebagai jembatan teknis.

4.2.3 Penyajian Data

Setelah melakukan tahap reduksi data maka langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data digunakan untuk membantu peneliti dalam mengolah dan menyusun hasil penelitian. Berikut adalah beberapa daya yang didapat oleh peneliti melalui wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan sebagai berikut:

A. Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder dalam Meningkatkan IDM

Implementasi Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder dalam Meningkatkan IDM terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu Peran strategis dalam peningkatan IDM, Pendekatan dalam mendorong stakeholder, Prioritas dalam peningkatan IDM, Monitoring dan evaluasi peran stakeholder. Adapun kesimpulan temuan yang diperoleh dari masing-masing instrument adalah sebagai berikut:

1. Peran Strategis dalam Peningkatan IDM

Berdasarkan hasil wawancara, Camat memiliki peran penting sebagai koordinator utama dalam penguatan sinergi lintas desa. Ia bertindak sebagai pengarah kebijakan yang memastikan bahwa program pembangunan desa mengacu pada indikator IDM. Dalam hal ini, camat mendorong agar setiap kepala desa dan perangkatnya memahami arah pembangunan yang berbasis data IDM. Camat juga menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dengan dinas kabupaten agar terjadi kesinambungan program.

Ketua paguyuban kepala desa berperan sebagai penghubung antar-kepala desa, memastikan adanya keselarasan dalam program prioritas yang mendukung peningkatan status IDM, serta menyuarakan kebutuhan kolektif kepada pihak kecamatan dan kabupaten. Sementara itu, pendamping desa sebagai ujung tombak di lapangan bertugas menerjemahkan kebijakan dan indikator IDM menjadi aksi nyata yang bisa dipahami dan dijalankan oleh aparat desa dan masyarakat.

2. Pendekatan dalam Mendorong Stakeholder

Camat dan Sekcam menggunakan pendekatan partisipatif dan komunikatif untuk melibatkan semua stakeholder dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program. Rapat koordinasi berkala, forum musyawarah desa, hingga bimtek dan sosialisasi rutin menjadi sarana utama untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama. Selain itu, metode informal seperti grup WhatsApp atau koordinasi lapangan juga sangat efektif dalam menjaga ritme kerja bersama.

Ketua paguyuban kepala desa lebih banyak menggunakan pendekatan horizontal—dengan saling mendengar dan mengakomodasi kebutuhan antar-desa, serta menjalin solidaritas agar desa-desa yang masih tertinggal bisa didorong bersama. Pendamping desa lebih fleksibel; mereka mendampingi dengan pendekatan langsung ke masyarakat dan perangkat desa, sembari memberikan asistensi teknis maupun fasilitasi musyawarah.

3. Prioritas dalam Peningkatan IDM

Semua stakeholder sepakat bahwa prioritas peningkatan IDM tidak bisa dipukul rata, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Namun, secara umum, aspek sosial seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi titik tekan awal, disusul oleh aspek ekonomi, yakni pengembangan BUMDes dan UMKM lokal, serta lingkungan, terutama dalam konteks mitigasi bencana.

Camat mendorong program-program yang bersifat integratif, misalnya pengembangan desa siaga, pemberdayaan ekonomi produktif, dan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat. Kasi PMD juga turut memastikan bahwa program yang diajukan oleh desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan indikator IDM, bukan hanya formalitas belaka.

4. Monitoring dan Evaluasi Peran Stakeholder

Proses monitoring dilakukan secara berjenjang, mulai dari desa ke kecamatan, lalu ke kabupaten. Camat dan kasi PMD melakukan pemantauan rutin melalui laporan kegiatan desa dan kunjungan lapangan. Evaluasi terhadap capaian IDM biasanya dilakukan tiap tahun, bertepatan dengan penginputan data IDM oleh pendamping desa.

Pendamping desa memiliki peran kunci dalam mengevaluasi realisasi kegiatan di lapangan, baik dari segi fisik maupun pencapaian output. Mereka menjadi penyambung data antara apa yang dilaporkan dan apa yang benar-benar terjadi. Jika ditemukan permasalahan, stakeholder biasanya mengadakan pertemuan bersama untuk mencari solusi cepat dan terukur, dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing desa.

B. Tingkat Komunikasi dan Kolaborasi Antar-Stakeholder

1. Frekuensi Komunikasi Antar-Stakeholder

Dari hasil wawancara dengan Sekcam dan stakeholder lainnya, diketahui bahwa komunikasi antar-stakeholder dilakukan secara intensif, meskipun tidak selalu dalam forum formal. Pertemuan resmi seperti rapat koordinasi kecamatan, musrenbang desa, dan forum musyawarah antar desa (MAD) dilaksanakan secara berkala minimal setiap triwulan. Namun, di luar forum tersebut, komunikasi informal terjadi lebih sering, terutama saat ada persoalan mendesak yang membutuhkan koordinasi cepat.

Pendamping desa menyampaikan bahwa komunikasi dengan kepala desa dan perangkatnya hampir terjadi setiap minggu, terutama saat pendampingan kegiatan atau pengumpulan data IDM. Camat dan Kasi PMD juga menjalin komunikasi secara fleksibel dengan kepala desa dan pendamping melalui media digital, untuk menghemat waktu dan memastikan respons cepat atas perkembangan di lapangan.

2. Jenis Komunikasi yang Digunakan

Jenis komunikasi yang digunakan oleh para stakeholder sangat beragam, dengan menyesuaikan kondisi dan urgensi informasi. Komunikasi tatap muka masih menjadi pilihan utama untuk rapat strategis dan evaluasi kebijakan, karena dianggap lebih efektif dalam menjalin kesepahaman. Sementara itu, untuk

koordinasi teknis sehari-hari, stakeholder lebih banyak menggunakan media digital seperti WhatsApp, panggilan telepon, dan email.

Sekam menyebutkan bahwa grup WhatsApp antar kepala desa dan perangkat kecamatan menjadi sarana yang sangat membantu dalam menyampaikan informasi dengan cepat. Namun, tantangannya adalah tidak semua informasi dapat ditangkap atau ditindaklanjuti dengan optimal melalui pesan singkat, sehingga tetap dibutuhkan forum tatap muka secara periodik.

3. Kualitas Komunikasi Antar-Stakeholder

Secara umum, kualitas komunikasi antar-stakeholder dinilai cukup baik, meskipun terdapat beberapa catatan. Para stakeholder menyampaikan bahwa komunikasi sudah terbuka dan responsif, tetapi dalam beberapa kasus terjadi miss komunikasi atau ketidaksinkronan antara apa yang direncanakan dan yang dilaksanakan. Hal ini biasanya disebabkan oleh perbedaan persepsi terhadap indikator IDM, atau keterbatasan waktu dalam menindaklanjuti informasi yang diterima.

Pendamping desa menekankan pentingnya kesamaan pemahaman terhadap istilah teknis dan alur perencanaan pembangunan berbasis IDM, karena perbedaan penafsiran bisa menghambat eksekusi program. Kasi PMD juga menyoroti pentingnya penyederhanaan bahasa teknis dalam komunikasi agar semua pihak, terutama desa, bisa memahami dengan baik.

4. Tingkat Kolaborasi Antar-Stakeholder

Tingkat kolaborasi antar stakeholder dinilai relatif kuat dan berkembang positif, terutama karena adanya kesamaan tujuan dalam meningkatkan status IDM desa. Kolaborasi paling terlihat saat menyusun dokumen RPJMDes, RKPDes, serta dalam pengumpulan data IDM. Setiap stakeholder memiliki porsi kerja yang saling melengkapi—kecamatan sebagai pengarah kebijakan, desa sebagai pelaksana teknis, dan pendamping desa sebagai fasilitator lapangan.

Kasi PMD menegaskan bahwa forum bersama seperti musrenbang sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan yang diusulkan sinkron dengan target IDM. Namun, tantangannya adalah belum semua stakeholder memiliki kapasitas yang merata dalam memahami aspek teknis kolaborasi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

5. Resolusi Konflik dan Penyelesaian Masalah

Dalam praktiknya, konflik antar-stakeholder memang tidak bisa dihindari, terutama ketika menyangkut penentuan skala prioritas program dan alokasi anggaran. Namun, mayoritas konflik dapat diselesaikan secara musyawarah, baik di tingkat kecamatan maupun dalam forum paguyuban kepala desa.

Contohnya, ketika terjadi perbedaan antara kepala desa dan pendamping mengenai indikator IDM yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, camat memfasilitasi diskusi terbuka agar masing-masing pihak menyampaikan argumen berdasarkan

data. Pendekatan persuasif dan berbasis bukti menjadi strategi utama dalam menyelesaikan konflik. Prosedur penyelesaian masalah bersifat non-formal namun efektif, karena didasari oleh hubungan kerja yang sudah terbangun dengan baik.

Penyajian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder dalam konteks peningkatan IDM di Kecamatan Sragi telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas komunikasi teknis dan kapasitas pemahaman lintas aktor.

C. Kendala dalam Sinergi dan Solusi yang Diterapkan

1. Hambatan Pemahaman terhadap IDM

Ketua Paguyuban Kepala Desa menyatakan bahwa pemahaman terhadap tiga dimensi IDM (sosial, ekonomi, dan lingkungan) masih belum merata di kalangan kepala desa. Beberapa kepala desa belum sepenuhnya memahami bagaimana indikator-indikator tersebut dinilai dan bagaimana penerapannya dalam dokumen perencanaan desa. Meski sudah ada sosialisasi dan pelatihan dari pihak kecamatan maupun pendamping desa, penyampaian materi kadang dirasa terlalu teknis dan kurang kontekstual.

Selain itu, Ketua Paguyuban juga menyebutkan bahwa perubahan regulasi atau instrumen pengukuran IDM dari pusat seringkali tidak segera diikuti oleh penyesuaian di tingkat bawah, menyebabkan kebingungan. Sebagai solusi, pihak kecamatan bersama pendamping desa mulai melakukan pendekatan berbasis

praktik langsung (learning by doing) agar kepala desa lebih mudah memahami indikator IDM melalui contoh kasus nyata.

2. Ketidakseimbangan Peran dan Tanggung Jawab

Beberapa informan, termasuk pendamping desa, mengungkapkan bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi peran antar-stakeholder, khususnya antara pemerintah desa, kecamatan, dan pendamping. Kadang pendamping desa dirasakan terlalu dominan dalam penyusunan dokumen perencanaan, sementara peran kepala desa menjadi pasif. Sebaliknya, ada juga kasus di mana kepala desa mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan pendamping atau kecamatan.

Ketua Paguyuban mengakui bahwa belum ada SOP yang baku dan dipahami **bersama** terkait pembagian tugas dalam proses perencanaan dan pelaporan berbasis IDM. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan pendekatan koordinatif yang lebih intensif serta penguatan kapasitas kelembagaan melalui lokakarya peran dan tanggung jawab lintas stakeholder.

3. Kesenjangan Komunikasi Antar-Stakeholder

Pendamping desa menyampaikan bahwa perbedaan pola komunikasi dan persepsi antar-stakeholder menjadi salah satu hambatan utama dalam sinergi. Komunikasi yang terlalu birokratis atau formal dari kecamatan kadang tidak bisa ditangkap secara operasional oleh desa. Sebaliknya, komunikasi informal dari desa juga kadang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses pelaporan.

Masalah ini coba diatasi melalui penguatan mekanisme komunikasi digital seperti penggunaan grup WhatsApp lintas stakeholder yang dipantau oleh kecamatan, serta adanya notulensi dan tindak lanjut yang jelas dari setiap pertemuan koordinasi.

4. Perbedaan Kepentingan dan Prioritas

Dalam wawancara dengan pendamping desa dan Kasi PMD, ditemukan bahwa perbedaan kepentingan antara stakeholder, seperti kepala desa yang lebih fokus pada pembangunan fisik, dengan pendamping desa yang mendorong penguatan kapasitas dan pemberdayaan, kerap menimbulkan ketegangan. Kecamatan pun sering menjadi pihak penengah.

Perbedaan prioritas ini terkadang menghambat sinergi dalam penetapan program IDM yang bersifat multidimensi. Untuk mengatasi perbedaan ini, stakeholder mulai menggunakan data IDM sebagai acuan bersama, sehingga penentuan program pembangunan bisa dilakukan secara objektif berdasarkan skor dimensi yang terendah, bukan sekadar preferensi politik atau kebiasaan lama.

5. Ketidakseimbangan Peran dan Tanggung Jawab (Repetisi untuk Penegasan)

Dalam banyak kasus, tumpang tindih tugas antara pendamping dan pemerintah desa masih sering terjadi, terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan atau penginputan data IDM. Hal ini kadang menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau miskomunikasi, bahkan memperlambat proses verifikasi data.

Sebagai solusi jangka pendek, dilakukan pembagian kerja yang lebih rinci melalui rapat teknis pra-kegiatan, dan sebagai solusi jangka panjang, telah diajukan usulan kepada pemerintah kabupaten agar menyusun pedoman teknis sinergi antar aktor di tingkat desa dan kecamatan, guna memperjelas batas peran masing-masing.

Secara umum, kendala-kendala dalam sinergi antar-stakeholder di Kecamatan Sragi berkisar pada perbedaan kapasitas, persepsi, dan pendekatan kerja, namun telah dilakukan berbagai upaya adaptif untuk menyelesaikannya secara bertahap melalui koordinasi, pelatihan, dan penyamaan persepsi berbasis data IDM.

D. Dampak Sinergi terhadap IDM (Indeks Desa Membangun)

1. Mitigasi Risiko Bencana

Ketua Paguyuban Kepala Desa mengemukakan bahwa sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pendamping desa telah berdampak positif terhadap kesiapsiagaan desa dalam menghadapi bencana alam, terutama banjir dan kekeringan yang sering terjadi di wilayah tertentu di Kecamatan Sragi. Melalui koordinasi lintas sektor, telah dibentuk tim tanggap darurat desa serta dilakukan pelatihan mitigasi risiko bencana yang didukung oleh BPBD dan pendamping teknis.

Program penanaman pohon, pembuatan saluran drainase, serta sistem informasi peringatan dini berbasis WhatsApp group juga menjadi bukti nyata bahwa sinergi memperkuat upaya preventif. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih siap dan

resisten terhadap bencana, yang berkontribusi pada peningkatan dimensi lingkungan dalam IDM.

2. Peningkatan Kepercayaan Antar-Stakeholder

Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten menyatakan bahwa tingkat kepercayaan antar-stakeholder meningkat seiring dengan intensitas kolaborasi dan keberhasilan beberapa program desa. Kepala desa mulai membuka ruang lebih besar bagi masukan dari pendamping desa, dan kecamatan berperan sebagai fasilitator yang menengahi perbedaan perspektif.

Salah satu strategi yang dianggap efektif adalah pelaksanaan forum bulanan lintas stakeholder yang menampilkan capaian, tantangan, dan praktik baik antar desa. Forum ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kepercayaan kolektif, sehingga mempercepat konsolidasi dalam pelaksanaan program peningkatan IDM.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Stakeholder

Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten menyoroti pentingnya sinergi dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Program pelatihan seperti bimbingan teknis perencanaan berbasis IDM, pelatihan digitalisasi data desa, serta pelatihan manajemen keuangan desa telah berjalan lebih efektif karena ada sinergi lintas pihak.

Bahkan, keterlibatan aktif kepala desa dan sekretaris desa dalam kegiatan pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan yang signifikan, terutama dalam menyusun rencana kerja yang selaras dengan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan IDM. Hal ini memperkuat landasan kapasitas tata kelola desa yang baik.

4. Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Dampak sinergi dalam aspek ekonomi ditunjukkan oleh keberhasilan beberapa desa mengembangkan UMKM dan BUMDesa melalui dukungan lintas sektor. Ketua Paguyuban mencontohkan program desa wisata dan pasar digital produk lokal yang dikembangkan bersama tenaga ahli dan difasilitasi oleh kecamatan.

Sinergi ini mendorong terwujudnya pendampingan usaha mikro secara intensif, perizinan usaha yang lebih cepat, dan promosi digital yang masif. Kontribusi dari tiap stakeholder terwujud dalam bentuk akses modal, pelatihan usaha, hingga fasilitasi kerja sama antar desa. Hal ini berdampak nyata pada peningkatan pendapatan masyarakat dan dimensi ekonomi dalam IDM.

5. Kualitas Layanan Sosial

Dari segi sosial, sinergi antar-stakeholder telah memperkuat akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi desa. Pendamping

desa bekerja sama dengan puskesmas dan dinas pendidikan dalam memastikan program posyandu, imunisasi, dan pendidikan anak usia dini berjalan lancar.

Kecamatan turut mengawal agar pelayanan publik di desa bisa berjalan sesuai SOP, termasuk melalui digitalisasi layanan desa. Meski masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur, sinergi yang terbangun telah membantu mengatasi kendala dan memperluas cakupan layanan. Dampaknya, indikator sosial seperti angka keikutsertaan pendidikan dan layanan kesehatan dasar menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder dalam Meningkatkan IDM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing stakeholder, seperti kecamatan, kepala desa, pendamping desa, dan tenaga ahli, memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam proses peningkatan IDM. Kecamatan bertindak sebagai koordinator dan fasilitator, kepala desa sebagai pelaksana kebijakan di tingkat tapak, sementara pendamping desa dan tenaga ahli menjadi penghubung teknis dan pendukung kapasitas.

Dalam praktiknya, keterlibatan stakeholder dalam perencanaan program, pengumpulan data IDM, serta pelaksanaan intervensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, telah mengarah pada pembagian peran yang semakin jelas dan terstruktur. Meski demikian, terdapat catatan bahwa belum semua desa

menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi peran secara optimal, terutama dalam mengukur dampak kegiatan terhadap indikator IDM. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan *governance* dan evaluasi kolaboratif antar pihak.

2. Tingkat Komunikasi dan Kolaborasi Antar-Stakeholder

Komunikasi antar-stakeholder tergolong aktif, dengan frekuensi yang cukup rutin melalui pertemuan formal seperti musyawarah desa dan rapat koordinasi tingkat kecamatan. Komunikasi informal melalui grup WhatsApp juga terbukti efektif dalam mempercepat respons terhadap isu-isu mendesak. Namun, kualitas komunikasi masih menghadapi tantangan dalam hal persepsi indikator IDM dan keterbatasan literasi digital di beberapa desa.

Kolaborasi antar-stakeholder telah berkembang ke arah yang lebih sinergis, ditandai dengan program bersama yang dirancang berdasarkan kebutuhan riil desa. Meskipun demikian, kolaborasi ini masih perlu diperkuat pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, terutama dalam penanganan konflik yang muncul karena perbedaan kepentingan atau prioritas.

3. Kendala dalam Sinergi dan Solusi yang Diterapkan

Penelitian menemukan beberapa hambatan krusial dalam menjalin sinergi, seperti pemahaman yang belum merata terhadap konsep IDM dan indikatornya. Beberapa kepala desa masih melihat IDM sebagai sekadar angka administratif,

bukan alat bantu perencanaan. Ketidakseimbangan peran juga muncul ketika beban kerja tidak proporsional atau terdapat ketimpangan dalam pengambilan keputusan.

Kesenjangan komunikasi dan perbedaan kepentingan sering menjadi sumber friksi. Solusi yang diterapkan selama ini berupa pelatihan bersama, pendampingan teknis, serta fasilitasi forum kolaborasi lintas stakeholder. Solusi tersebut cukup efektif, namun masih bersifat insidental, sehingga dibutuhkan pendekatan sistemik dan berbasis regulasi untuk memperkuat struktur sinergi jangka panjang.

4. Dampak Sinergi terhadap IDM (Sosial, Ekonomi, Lingkungan)

Sinergi yang terjalin antar stakeholder telah memberikan dampak yang konkrit terhadap peningkatan nilai IDM di sejumlah desa. Dari dimensi sosial, peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan terfasilitasi lebih baik. Pendamping desa dan tenaga ahli aktif mendampingi program sosial desa, sehingga indikator partisipasi dan inklusi sosial meningkat.

Pada dimensi ekonomi, kolaborasi antar pihak telah mendorong tumbuhnya UMKM, BUMDesa, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dukungan stakeholder dalam promosi, akses permodalan, dan pelatihan usaha menjadi kunci keberhasilan.

Sementara itu, dari dimensi lingkungan, upaya mitigasi risiko bencana menjadi lebih sistematis berkat sinergi lintas pihak. Desa-desa mulai memiliki *early warning system*, tim tanggap bencana, dan kegiatan penghijauan yang dirancang bersama.

Secara umum, sinergi memberikan penguatan kelembagaan lokal, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan tata kelola desa yang berkelanjutan. Namun, keberlanjutan sinergi ini akan sangat bergantung pada komitmen jangka panjang dan dukungan lintas sektor secara konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disajikan dalam diagram berikut ini pada Gambar 4.3.1



Gambar 4.3-1 Diagram Sinergitas Stakeholder dalam Peningkatan IDM

Diagram di atas menggambarkan sinergisitas antar-stakeholder dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), yang melibatkan peran aktif Camat, Sekcam, Kasi PMD, dan Pedamping Desa. Setiap pihak memiliki fungsi strategis yang saling melengkapi

Interaksi mereka ditunjukkan melalui alur koordinasi yang terstruktur, pembagian tugas yang jelas, dan ruang dialog yang memungkinkan penyesuaian strategi. Sinergi ini mendorong efektivitas pelaksanaan program, meningkatkan kepercayaan antar-stakeholder, serta memperkuat dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara merata di desa serta memungkinkan percepatan peningkatan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sragi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sinergi antara stakeholder di Kecamatan Sragi, yakni Camat, Sekcam, Kasi PMD, Pendamping Desa, dan unsur kepala desa telah terbentuk dengan baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek komunikasi dan penyelarasan prioritas. Sinergi ini terbukti berkontribusi terhadap percepatan peningkatan IDM pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Peran masing-masing stakeholder berjalan sesuai fungsinya. Camat memiliki fungsi strategis sebagai pengarah kebijakan dan koordinator lintas desa. Sekcam mendukung aspek teknis dan administrasi. Kasi PMD berperan penting dalam merumuskan program dan evaluasi. Sementara Pendamping Desa menjadi pelaksana teknis dan fasilitator di lapangan.
3. Komunikasi dan koordinasi berjalan cukup intensif, baik melalui rapat koordinasi rutin maupun komunikasi informal seperti grup WhatsApp. Namun, beberapa kendala seperti perbedaan persepsi terhadap indikator IDM dan kurangnya pemahaman teknis masih dijumpai.
4. Kendala sinergi seperti ketimpangan pemahaman terhadap IDM, perbedaan kepentingan antar-stakeholder, dan tumpang tindih peran, telah diselesaikan

melalui pendekatan musyawarah, klarifikasi peran, serta pendampingan teknis secara berkelanjutan.

5. Dampak sinergi yang dihasilkan cukup signifikan. Di antaranya adalah peningkatan kualitas layanan sosial, penguatan kapasitas SDM, pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM, serta kesiapsiagaan desa dalam menghadapi risiko bencana. Kepercayaan antar-stakeholder juga meningkat sebagai hasil dari kolaborasi yang intens.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu penyamaan persepsi secara berkala terkait indikator IDM dan prioritas program pembangunan melalui forum diskusi lintas sektor agar semua stakeholder memiliki arah yang sama.
2. Penguatan kapasitas SDM harus terus ditingkatkan, terutama melalui pelatihan teknis indikator IDM bagi kepala desa dan perangkatnya misalnya pada profil desa, agar mampu menyusun program yang tepat sasaran.
3. Perlu dibentuk sistem monitoring dan evaluasi berbasis kolaborasi, yang melibatkan seluruh stakeholder secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil.
4. Optimalisasi peran Sekcam sebagai penghubung administratif dan kontrol koordinatif perlu diperkuat untuk menjaga kelancaran sinergi antarlini.

5. Penggunaan teknologi informasi harus terus didorong agar komunikasi antarpihak semakin efisien, termasuk pemanfaatan dashboard atau sistem pelaporan digital untuk perkembangan IDM.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Dari Artikel Jurnal

- Adekola, Josephine, and Denis Fischbacher-smith Moira. 2021. "Inherent Complexities of a Multi-Stakeholder Approach to Building Community Resilience." *International Journal of Disaster Risk Science*. doi:10.1007/s13753-020-00246-1.
- Agustinus, Edy, Giska Hedyanti, and Pembangunan Daerah Tertinggal. 2019. "INDEKS DESA MEMBANGUN (STUDI KASUS DI KABUPATEN SAMBAS) PARTICIPATION ' S LEVEL OF STAKEHOLDERS IN INCREASED INDEKS DESA MEMBANGUN (CASE STUDY IN SAMBAS REGENCY) Sejak Era Pemerintahan Joko Provinsi Kalimantan Barat Posisinya." 5(2): 124–42.
- Eksekutif, Rangkuman. 2019. "Mengoptimalkan Pendampingan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa." (3).
"Qualitative-Research-Evaluation-Methods-by-Michael-Patton.Pdf."
- Sanur, Debora, and Riwayat Artikel. 2023. "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No . 6 Tahun 2014 Tentang Desa Village Development Post Law No . 6 of 2014 on Villages." 14(6): 1–21. doi:10.22212/jp.v14i1.4120.
- Shaddiq, Syahril, and Universitas Lambung Mangkurat. 2024. "Kajian Pembangunan Desa Berbasis Indeks Desa Membangun." (February).

Soedirman, Universitas Jenderal, and Upbjj-ut Purwokerto. "PERAN
PENDAMPING DESA DALAM MODEL Sentralistik Dari Pemerintah
Yang Bersifat Top down , Dan Masyarakat Sebagai Civil Dan Pembangunan
Melalui Pemberdayaan Yang Yaitu Pemberdayaan Masyarakat Salah
satunya Dengan Penyuluhan . Berdasarkan Peraturan Menteri Desa ,
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa , Tindakan
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Asistensi , Pengorganisasian ,
Pengarahan Partisipatif ; (c) Meningkatkan Sinergi Program Pembangunan
Desa Antarsektor ; Dan." : 40–60.

Wahyuni, Endang, U I Qadri, and Sri Syabanita Elida. 2020. "IMPLEMENTASI
PROGRAM DESA MANDIRI MELALUI PENINGKATAN INDEKS
DESA MEMBANGUN (IDM)." 1(2): 76–83. doi:10.31573/jpab.v1i2.9.

Wijayanto, Fery, and Asep Ridwan. 2024. "Peningkatan Indeks Desa Membangun
(IDM) Melalui Program Pembangunan Pedesaan Berbasis Komunitas."
03(02): 209–19.

Triviño-salazar, Juan Carlos. 2023. "Transnational City Networks on Migration
and Integration and Local Collaborative Governance : Establishing the
Nexus." (February). doi:10.1177/01979183231154558.

2. Sumber Dari Buku Teks

Bryson, John M, and Barbara C Crosby. 2015. "Designing and Implementing

Cross-Sector Collaborations: Needed.” 75: 647–63.

doi:10.1111/puar.12432.Designing.

Gash, Alison. 2014. “Collaborative Governance in Theory and Practice.” (June).

Title, Half, Title Page, Copyright Page, Brief Contents, Detailed Contents,
Companion Website, and Part I Preliminary Considerations. *Table of
Contents.*

3. Sumber dari Basis Data Tanpa Penulis

Eksekutif, Rangkuman. 2019. “Mengoptimalkan Pendampingan Untuk
Pemberdayaan Masyarakat Desa.” (3). doi:10.1093/jopart/mum032.

